



BUPATI SUMENEP

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2024



PEMERINTAH KAB.
SUMENEP

#Bismillah Melayani



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	8
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	18
BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1 Capaian Kinerja Makro	21
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	23
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	23
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	28
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	29
BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten	81
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten	88
3.3 Permasalahan	100
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	100
BAB IV : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
4.1 Urusan Pendidikan	101
4.2 Urusan Kesehatan	104
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	114



4.4 Urusan Perumahan Rakyat	139
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	139
4.6 Urusan Sosial	140
4.7 Program dan Kegiatan	136
BAB V : PENUTUP	142

LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep kepada Pemerintah yang merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dalam menjalankan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit dan komprehensif dengan prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien sebagai pengejawantahan berbagai langkah kebijakan program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan sesuai dengan arah dan kebijakan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep (RPJMD) Tahun 2021 – 2026.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 kepada Pemerintah ini disampaikan kepada Pemerintah / Menteri dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur didalamnya memuat berbagai pelaksanaan kebijakan dan program yang secara teknis yang dilaksanakan oleh Badan, Dinas, Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep secara garis besar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021 - 2026 dengan 8 prioritas program sebagai berikut :



1. Penguatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan guru sekolah, guru ngaji dan guru madrasah diniyah serta dukungan program beasiswa.
2. Peningkatan kualitas standar pelayanan dan pembangunan kesehatan dasar.
3. Mencetak Wirausaha Santri dan kalangan muda di era industri 4.0.
4. Pengembangan Ekonomi Kawasan dan Percepatan Ekonomi berbasis Desa Tematik.
5. Mewujudkan Kawasan Wisata Madura (Visit Madura) dan Pengembangan ekonomi kreatif.
6. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (Smart City).
7. Peningkatan penanganan masalah sosial dengan semangat gotong royong.
8. Peningkatan Insfrastruktur dan Moda Transportasi Kepulauan.

Disadari bahwa Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 masih jauh dari sempurna, oleh karenanya diharapkan sumbang saran dan masukan yang lebih konstruktif guna penyempurnaan penyusunan laporan - laporan selanjutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan LPPD ini baik Badan, Dinas, Bagian dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan harapan semoga kedepan kita akan menjadi lebih baik.

Sumenep, 27 Maret 2025

BUPATI SUMENEP



Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substantif Informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sumenep, 26 Maret 2025


**PIT INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

NURUL JAMIL, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19680325 199003 1 005

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a) Undang-Undang Pembentukan Daerah

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 09)

b) Data Geografis Wilayah

1. Luas Wilayah

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten yang berada di Pulau Madura yang masuk dalam wilayah Propinsi Jawa Timur, terletak diujung timur Pulau Madura dengan luas wilayah admisnistrasi seluas 2.093,47 Km² terdiri dari wilayah Daratan dan Kepulauan, dengan luas wilayah perairan ± 50.000 km².

Gugusan pulau-pulau di Kabupaten Sumenep, pulau yang terjauh/paling utara adalah pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ± 151 mil laut dari pelabuhan Kalianget, lebih dekat dengan Kalimantan Selatan.

Sedangkan pulau paling timur adalah pulau Sakala terletak di Kecamatan Sapeken dengan jarak ± 165 mil laut dari pelabuhan Kalianget, lebih dekat dengan Pulau Sulawesi.

Secara Geografis Kabupaten Sumenep terbagi atas 2 bagian :

- ~ Bagian daratan dengan luas 1.146,927065 Km² (54,79%) terbagi atas 18 Kecamatan, terdiri dari Kecamatan : Ambunten; Batangbatang; Batu Putih; Bluto; Dasuk; Dungkek; Ganding; Gapura; Guluk-guluk; Kalianget; Lenteng; Manding; Pasongsongan; Pragaan; Rubaru; Saronggi, Batuan dan Sumenep.
- ~ Bagian kepulauan dengan luas 946,530508 Km² (45,21%) terbagi atas 9 Kecamatan, terdiri dari Kecamatan : Arjasa; Gayam;



Giligenteng; Masalembu; Nonggunong; Raas; Sapeken, Kangayan dan Talango.

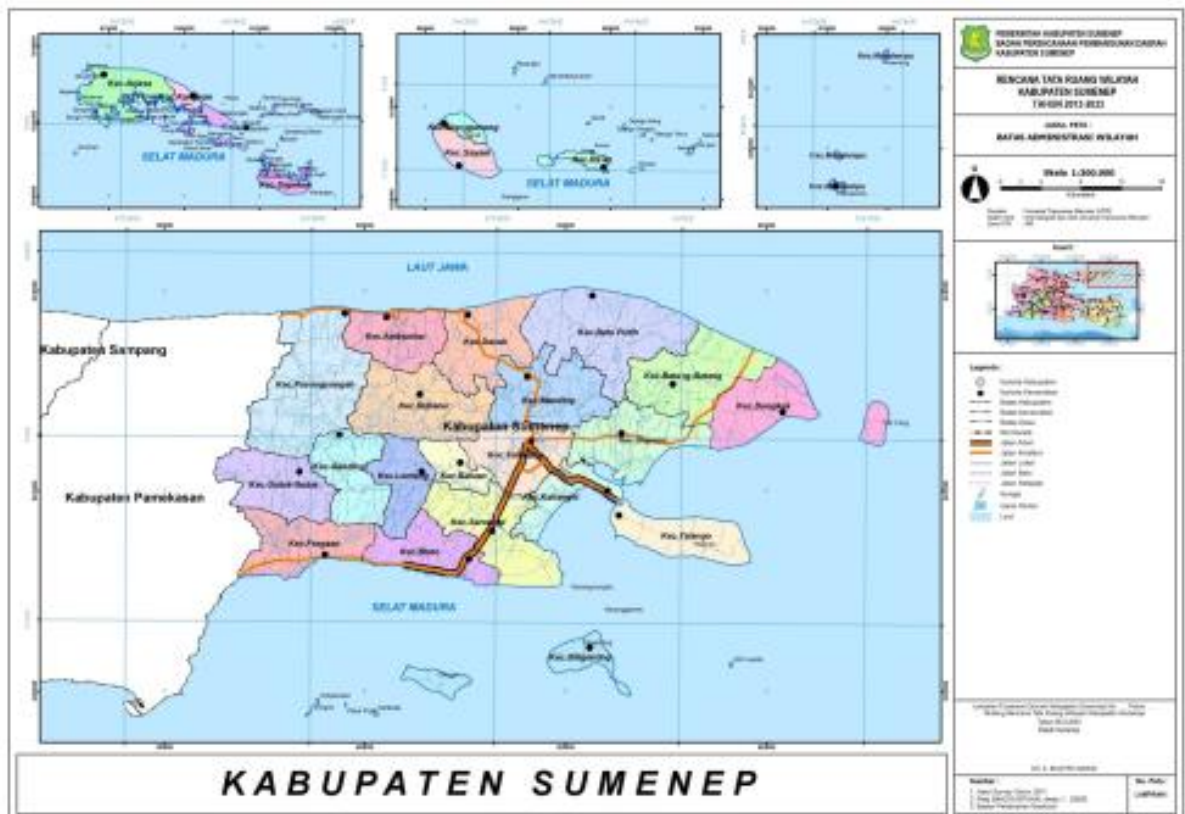
2. Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten kepulauan yang terletak antara 113° 32' 54" - 116° 16' 48" Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Selat Madura
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
4. Sebelah Timur : Laut Jawa/Laut Flores

Gambar 1.1

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sumenep



Sumber : RTRW Kabupaten Sumenep 2013-2033

c) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2024 (DKB Semester II Tahun 2024) sebanyak 1.143.002 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 552.127 jiwa (48,30%) dan perempuan 590.875 jiwa (51,69%) dengan



sex ratio sebesar 93,44%. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Sedangkan berdasarkan data BPS jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 yang sebanyak 1.143.024 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 546.826 jiwa (48,25%) dan perempuan 586.398 jiwa (51,75%) dengan sex ratio sebesar 93,25 %. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki.

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 5 suku bangsa yaitu: Madura, Jawa, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari kelima suku bangsa tersebut 3 suku bangsa, yaitu : Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan, yaitu: Kangean, Masalembu dan Sapeken yang lebih dekat ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan suku Madura merupakan suku mayoritas bertempat di wilayah daratan dan sebagian kecil di kepulauan.

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KOTA SUMENEP	26.315	37.260	39.332	51,42
2	KALIANGET	15.767	20.810	21.967	51,26
3	MANDING	10.392	14.710	15.801	51,95
4	TALANGO	14.220	18.025	20.705	53,45
5	BLUTO	16.890	24.260	25.280	51,25
6	SARONGGI	14.365	18.649	20.160	52,19
7	LENTENG	21.269	30.075	32.466	51,96
8	GILIGENTING	8.740	11.322	12.946	52,84
9	GULUK GULUK	16.070	24.349	26.071	51,78
10	GANDING	12.103	17.982	19.191	51,82
11	PRAGAAN	23.063	32.803	34.627	51,49
12	AMBUNTEN	14.972	19.263	21.621	52,82
13	PASONGSONGAN	16.791	25.600	26.343	50,79
14	DASUK	11.144	15.170	16.088	51,72



NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
15	RUBARU	12.858	19.514	21.167	52,03
16	BATANG BATANG	20.338	26.725	29.056	52,09
17	BATUPUTIH	16.234	21.489	23.511	52,25
18	DUNGKEK	14.546	17.353	19.468	52,87
19	GAPURA	13.994	18.605	20.266	52,14
20	GAYAM	13.490	15.030	16.982	53,05
21	NONGGUNONG	5.744	6.476	7.121	52,37
22	RA'AS	12.079	15.620	16.800	51,82
23	MASALEMBU	9.407	12.660	12.890	50,45
24	ARJASA	31.421	41.508	42.478	50,58
25	SAPEKEN	17.914	27.629	27.787	50,14
26	BATUAN	4.873	6.719	7.133	51,49
27	KANGAYAN	10.180	12.521	12.657	50,27
JUMLAH		401.672	551.366	590.844	1.142.210

d) Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan

Secara Administratif Wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas :

- a) 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan terdiri dari :
 - ~ 18 Kecamatan Daratan
 - ~ 9 Kecamatan Kepulauan
- b) 334 (Tiga ratus tiga puluh empat) Desa terdiri dari :
 - ~ 260 Desa di wilayah daratan
 - ~ 70 Desa di wilayah kepulauan
- c) 4 (empat) Kelurahan di wilayah daratan.
- d) 1564 (Seribu Lima ratus enam puluh empat) Dusun.
- e) 5569 (Lima ribu lima ratus enam puluh sembilan) RT.
- f) 1774 (Seribu tujuh ratus tujuh puluh empat) RW.



Tabel
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas
		Desa/Kel.	Dusun	(Km ²)
1.	Kota Sumenep	16	40	27,84
2.	Batuan	7	23	27,10
3.	Kalianget	7	26	30,19
4.	Manding	11	49	68,88
5.	Talango	8	62	50,27
6.	Bluto	20	60	51,25
7.	Saronggi	14	54	67,71
8.	Lenteng	20	79	71,41
9.	Giligenting	8	40	30,32
10.	Guluk-Guluk	12	70	59,57
11.	Ganding	14	73	53,97
12.	Pragaan	14	72	57,84
13.	Pasongsongan	10	68	119,03
14.	Ambunten	15	53	50,54
15.	Dasuk	15	56	64,50
16.	Rubaru	11	37	84,46
17.	Batang-Batang	16	98	80,36
18.	Batuputih	14	78	112,31
19.	Dungkek	15	66	63,35
20.	Gapura	17	57	65,78
21.	Gayam	10	58	88,40
22.	Nonggunong	8	29	40,08
23.	Ra'as	9	38	38,90
24.	Masalembu	4	11	40,85
25.	Arjasa	19	156	241,99
26.	Kangayan	9	46	204,68
27.	Sapeken	11	48	201,89
	JUMLAH	334	1.547	2.093,47



e) Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

NO	UNIT KERJA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	STAF	TOTAL
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	21	41	68
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	12	23
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	0	26	26
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	21	8	52	78
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	14	25	46
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12	8	37	52
7	Dinas Kesehatan, P2KB	11	1449	257	1.714
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	13	179	40	227
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7	15	26	48
10	Dinas Koperasi, UKM, Perindag.	10	13	44	64
11	Dinas Lingkungan Hidup	10	9	85	101
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata	9	12	21	39
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	15	27	96	132
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	10	24	41
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	10	12	32	52
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7	23	31	60
17	Dinas Pendidikan	15	4574	612	5.199
18	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	16	10	83	106
19	Dinas Perikanan	9	14	18	39
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	13	12	31
22	Inspektorat	8	45	18	68
23	Satuan Polisi Pamong Praja	14	1	63	77



NO	UNIT KERJA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	STAF	TOTAL
24	Sekretariat Daerah	17	26	143	185
25	Sekretariat DPRD	6	11	46	63
26	Kecamatan Ambunten	9	0	11	19
27	Kecamatan Arjasa	9	0	19	24
28	Kecamatan Batang-batang	9	0	19	27
29	Kecamatan Batuan	9	0	12	19
30	Kecamatan Batuputih	9	0	12	19
31	Kecamatan Bluto	9	0	14	21
32	Kecamatan Dasuk	9	0	7	13
33	Kecamatan Dungkek	9	0	9	16
34	Kecamatan Ganding	9	0	7	16
35	Kecamatan Gapura	9	0	17	25
36	Kecamatan Gayam	9	0	14	20
37	Kecamatan Giligenting	9	0	9	16
38	Kecamatan Guluk-Guluk	9	0	6	14
39	Kecamatan Kalianget	9	0	9	16
40	Kecamatan Kangayan	9	0	8	11
41	Kecamatan Kota Sumenep	9	0	10	19
42	Kecamatan Lenteng	9	0	8	15
43	Kecamatan Manding	9	0	17	24
44	Kecamatan Masalembu	9	0	3	10
50	Kecamatan Nonggunong	9	0	10	15
51	Kecamatan Pasongsongan	9	0	4	12
52	Kecamatan Pragaan	9	0	9	16
53	Kecamatan Raas	9	0	5	10
54	Kecamatan Rubaru	9	0	8	15
55	Kecamatan Sapeken	9	0	9	16
56	Kecamatan Saronggi	9	0	13	20
57	Kecamatan Talango	9	0	9	16
58	Kelurahan Bangselok	5	0	3	8



NO	UNIT KERJA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL	STAF	TOTAL
59	Kelurahan Karangduak	5	0	2	7
60	Kelurahan Kepanjin	5	0	4	8
61	Kelurahan Pajagalan	5	0	6	10
JUMLAH		410	6.500	2.126	9.036

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan strategis di Kabupaten Sumenep secara umum dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti tercermin dengan masih banyaknya persoalan di bidang pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Persoalan di bidang pendidikan masih perlu dibenahi, baik dari segi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata antara wilayah daratan dan kepulauan, juga akses dan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan umumnya masih rendah
3. Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. masih rendahnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, sehingga menghambat kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dalam pengembangan potensi ekonomi lokal
4. Belum terwujudnya kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Hal ini tercermin dari kurang profesionalnya Aparatur Sipil Negara, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,lemahnya kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat



penyelenggaraan pemerintahan daerah, kurangnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik, dan belum optimalnya pelayanan publik.

5. Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
6. Masih adanya budaya masyarakat terutama di pedesaan yang main hakim sendiri dalam menyelesaikan konflik.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Capaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sumenep yang sudah dilaksanakan selama ini, harus terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan, sebagai modal dasar untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik pada masa mendatang.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan yang lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, untuk mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan dengan didukung berbagai fasilitas layanan publik yang sesuai dengan standart pelayanan minimal (SPM), serta kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna



mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;
- d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah

“Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”

Di dalam visi tersebut terdapat 3 makna kata kunci yaitu : Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera.

UNGGUL

Unggul dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja. Disisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarakat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur.

MANDIRI

Memiliki makna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikian juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/stakeholders yang lain.



SEJAHTERA

Memiliki arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin tinggi serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih mandiri merefleksikan sikap dan komitmen untuk mencetak masyarakat yang lebih unggul, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kurang berdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

2. Misi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai problem solving permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan **Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera** seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

MISI PERTAMA

**Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing
Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.**



Pada misi Pertama berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Konstruksi pendidikan dalam konteks ini bahwa pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat pendidikan maksimal dan jaminan mutu pendidikan. Komitmen peningkatan mutu pendidikan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama untuk memajukan pembangunan khususnya di Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Peningkatan pendidikan dalam misi melalui program peningkatan kompetensi pendidik, kesejahteraan guru honorer, guru ngaji dan guru madrasah diniyah serta support bantuan sarana dan prasarana serta stimulus program beasiswa berprestasi bagi siswa dan tenaga pendidik baik dilingkungan sekolah umum maupun diniyah.

Kesehatan sebagai salah satu hak dasar rakyat yang dilindungi undang-undang saat ini terus dibangun dan ditingkatkan. Pembangunan kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Pandangan diatas bisa terwujud bila diimbangi dengan sistem pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang handal serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Sisi yang lain ikhtiar peningkatan status akreditasi BLUD puskesmas dan membangun Rumah Sakit Tipe D di tiap eks pembantu bupati. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep tergolong rendah di Jawa Timur, namun kesejahteraan masih tergolong rendah. Oleh karena itu kualitas Ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus dalam meningkatkan daya saing SDM.

MISI KEDUA

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi

Berbasis Kawasan dari Hulu ke Hilir.

Dalam rangka memperkuat kemajuan ekonomi masyarakat lokal dengan menggerakkan sektor unggulan daerah (desa/kecamatan); yaitu sektor pertanian pangan, dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti



peningkatan/pembangunan irigasi atau sumber mata air dengan kelengkapan peralatan yang didukung sarana produksi, bibit unggul, pupuk berimbang serta alat produksi modern yang ramah lingkungan. Sektor pertanian ini dapat ditingkatkan lagi dengan mencobakan komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan efisiensi produksi yang dikerjakan dengan pola budidaya terpadu serta pengembangan sistem budidaya produksi dari hulu-hilir yang terkendali dalam tata organisasi yang terpadu dan terkendali dengan baik untuk mencapai nilai tambah yang optimal, meningkatnya swasembada beras, swasembada pangan menuju ketahanan pangan; Bidang peternakan, usaha untuk menguatkan populasi ternak yang ada di Sumenep yang kian hari semakin sedikit. Oleh sebab itu penting dilakukan terobosan yang efektif dengan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholders melalui system peternakan yang modern yaitu inseminasi bibit ternak. Demikian pula sector kelautan dan perikanan, melalui konsep budaya bahari dengan melibatkan masyarakat secara holistic dan pengembangan yang terintegrasi dengan pusat pelelangan ikan, cold storage dari hulu ke hilir. Sumenep banyak potensi pariwisata yang harus dimaksimalkan sehingga berdampak pada penguatan sektor ekonomi masyarakat. Konsepnya adalah pemerintah daerah bersama masyarakat serta melibatkan swasta dalam pengembangan pariwisata di Sumenep tanpa menceraiberaikan nilai-nilai local wisdom. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke Sumenep.

MISI KETIGA

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat.

Proses pembangunan wajib didukung oleh semangat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan peningkatan implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan



publik. Sisi lainnya adalah keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik, dan peningkatan implementasi open government secara terpadu pada seluruh instansi pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.

MISI KEEMPAT

Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal.

Masalah sosial senantiasa hadir di berbagai negara, dengan kompleksitas masalah sosial seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, kenakalan remaja dan seks bebas, kekurangan gizi dan penyakit menular. Dengan memperhatikan keberagaman masyarakat, dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan geografi, pembangunan manusia dilakukan secara kohesif dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan latar belakang mereka. Pengentasan masalah sosial tidak semata-mata menjadi kewajiban negara (pemerintah daerah), namun semangat gotong royong yang merupakan watak, karakter dan kepribadian masyarakat kita yang harus diperkuat.

MISI KELIMA

Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup yang Berimbang Antara Daratan dan Kepulauan.

Pembangunan Infrastruktur diprioritaskan untuk wilayah kepulauan, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas dengan pembangunan di wilayah daratan. Oleh sebab itu, penting dilakukan percepatan pembangunan jalan-jalan strategis, irigasi untuk menambah produktivitas hasil pertanian dan perdagangan hasil bumi serta sarana telekomunikasi dan listrik 24 jam.

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah

Sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Sumenep tahun 2022-2026 program pembangunan Kabupaten Sumenep terdiri dari :

❖ Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan



- b. Program Pengembangan Kurikulum
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- f. Program Pengembangan Permukiman
- g. Program Penataan Bangunan Gedung
- h. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- i. Program Penyelenggaraan Jalan
- j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
- e. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- b. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
- c. Program Penanggulangan Bencana
- d. Program pencegahan, penanggulangan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- c. Program Rehabilitasi Sosial
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- e. Program Penanganan Bencana
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

❖ Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

3. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

4. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

5. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

7. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

8. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

9. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota



10. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

❖ Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- c. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- a. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
- b. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- b. Program pengendalian izin usaha industri

❖ Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

2. Keuangan

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Pendidikan Dan Pelatihan

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia



4. Penelitian Dan Pengembangan

- a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

❖ Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

❖ Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM.

Kebijakan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya



kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensidan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui



penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran - ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.



CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Berikut hasil Capaian kinerja makro di Kabupaten Sumenep mulai pada tahun 2023 dan 2024 :

No	Indikator Kinerja Makro	TAHUN 2023	TAHUN 2024	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	69.13	69.78	0.65
2	Angka Kemiskinan	18.70	17.78	- 0.92
3	Angka Pengangguran	1.71	1.69	- 0.02
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.35	3.77	-1,58
5	Pendapatan Per kapita	37.370	39.215	1.845
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.28	0.308	0.028

1. Indeks pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Sumenep mencatatkan kemajuan yang signifikan di tahun 2024 dengan pencapaian angka 69.78%.

Peningkatan IPM ini mencerminkan keberhasilan pembangunan di tiga dimensi utama yaitu Pengetahuan, Standar Hidup Layak, Umur Panjang dan Hidup Sehat.

2. Angka Kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari peran media yang telah banyak memberikan informasi terkait program-program dalam pengentasan kemiskinan.



Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep tahun 2024 didapatkan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran (Modul KP)

3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 adalah 1,69%. Angka ini menurun 0,02% dibandingkan tahun 2023.

- Rincian TPT di Kabupaten Sumenep:
 - a. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki TPT tertinggi sebesar 8,07%
 - b. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki TPT sebesar 4,57%
- Upaya menekan angka pengangguran di Sumenep:
 - a. Melakukan pendataan pencari kerja melalui aplikasi Sisnaker
 - b. Mengadakan job fair untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan
 - c. Memposting lowongan pekerjaan di media sosial
 - d. Meningkatkan kualitas sektor ekonomi, pendidikan, dan keterampilan tenaga kerja

4. Pertumbuhan ekonomi

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 merupakan hasil dari berbagai program pembangunan yang terintegrasi di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
- b. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 ditandai dengan peningkatan IPM yang signifikan.
- c. Kenaikan IPM Kabupaten Sumenep terjadi pada semua dimensi pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

5. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu Daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan Kabupaten dengan jumlah penduduk Kabupaten.

Tercatat bahwa pada tahun 2023 pendapatan per kapita Kabupaten Sumenep mencapai 37,370, sedangkan untuk tahun 2024 pendapatan per kapita Kabupaten Sumenep mencapai 39.215 .



6. Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio merupakan alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, pada tahun 2023 Kabupaten Sumenep memperoleh capaian sebesar 0,28. Sedangkan Pada tahun 2024 ,ketimpangan pendapatan meningkat menjadi 0.308.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	73,04%	
		2. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi pendidikan dasar	103,75%	
		3. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 th yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah utama	105,10%	
		4. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	45,77%	
2	Kesehatan	5. Rasio daya tamping RS terhadap jumlah Penduduk	0.60%	
		6. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	100%	
		7. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	79.11%	
		8. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	75,5%	
		9. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	77,28%	
		10. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	90,58	
		11. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83,50%	
		12. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,30%	
		13. Persentase warga Negara usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,20 %	
		14. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87.23%	
		15. Persentase penderita DM yng mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95.36%	
		16. Persentase ODGJ berat yang	94,66%	



		mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
		17. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	
		18. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab.	78,50%	
		20. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab.	22,19%	
		21. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab. yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,61%	
		22. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	91,24%	
		23. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	85,98%	
		24. Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	100%	
		25. Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	70,39%	
		26. Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	14,75%	
		27. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	
4.	Perumahan Rakyat	28. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	0%	
		29. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	0%	
		30. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	0	
		31. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,49%	
		32. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	23,27%	
5.	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33. Persentase gangguan rantibum yang dapat diselesaikan	94,73%	
		34. Persentase Perda dan perkara yang ditegakkan	100%	
		35. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	



		36. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.14%	
		37. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	
		38. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	
		39. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11.75	
6.	Sosial	40. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	99,75%	
		41. Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.	71,72%	
7.	Tenaga Kerja	42. Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	
		43. Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	0,21%	
		44. Tngkt produktivitas tenaga kerja	2,89%	
		45. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	13,36%	
		46. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	41,22%	
8	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	47. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,16%	
		48. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	
		49. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,21%	
9	Pangan	50. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	22.458%	
10	Pertanahan	51. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	99,60%	
		52. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	
		53. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	
		54. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap	Nihil	



		diredistribusika yang berasal dari Tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absentee		
		55. Tersedianya tanah utk masyarakat	Nihil	
		56. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	
11	Lingkungan Hidup	57. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	63,98%	
		58. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab	96,31%	
		59. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	25	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60. Perakaman KTP elektronik	96,01%	
		61. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	57,97%	
		62. Kepemilikan akta kelahiran	99,17%	
		63. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	37,25%	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64. Persentase pengentasan desa tertinggal	NIHIL	
		65. Persentase peningkatan status desa mandiri	70,13%	
14	Pengndalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66. TFR (Angka Kelahiran Total)	2,08	
		67. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr)	59,82%	
		68. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,93%	
15	Perhubungan	69. Rasio konektivitas kabupaten	95,76	
		70. Kinerja lalu lintas kabupaten	0,261	
16	Komunikasi dan Informatika	71. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	
		72. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	
		73. Persentase masyarakat yang menjadi saran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	96,28%	
17	Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	74. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	8,01%	
		75. Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi wirausaha	5,27%	
18	Penanaman Modal	76. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	30,64%	
19	Kepemudaan dan Olahraga	77. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,042%	
		78. Tingkat partisipasi pemuda dalam	1,16%	



		organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		
		79. Peningkatan prestasi olahraga	54	
20	Statistik	80. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	
		81. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	
21	Persandian	82. Tingkat keamanan informasi pemerintah	52,40%	
22	Kebudayaan	83. Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	
23	Perpustakaan	84. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	78,9%	
		85. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,91%	
24	Kearsipan	86. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	87,63%	
		87. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsi sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	16,67%	
25	Kelautan dan Perikanan	88. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data:one data KKP)	104,48%	
26	Pariwisata	89. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-17,11	
		90. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab.	22,46	
		91. Tingkat hunian akomodasi	11,30%	
		92. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,82%	
		93. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,13%	
27	Pertanian	94. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	389,60%	
		95. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1,64	
28	Energi dan Sumber Daya Mineral	96. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	0	
29	Perdagangan	97. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS /SIUP Toko Swalayan)	98,21%	



		98. Persenta kinerja realisasi pupuk	49,41%	
		99. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	31,76%	
30	Perindustrian	100. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	4,53%	
		101. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dala, RIPIN yng ditetapkan dlm RPIP	0%	
		102. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	21,10%	
		103. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan instansi terkait	Nihil	
		104. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasi Kabupaten	Nihil	
		105. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Sumber Data
1	Perencanaan dan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	14.18%	
		2. Rasio PAD	11.38%	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat Kabupaten Sumenep sudah mencapai Maturitas SPIP Level 3	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat Kabupaten Sumenep sudah mencapai Maturitas SPIP Level 3	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	58.73%	
		6. Opini Laporan Keuangan	7	
2	Pengadaan	7. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	
		8. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	85,86%	
		9. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	40,00%	



		10. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	20,45%	
3	Kepegawaian	11. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	67.59%	
		12. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	26.02%	
		13. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	28.73%	
4	Manajemen Keuangan	14. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	7,57%	
		15. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	21,23%	
		16. Manajemen asset	4	
		17. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD sebelumnya	14,69%	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	18. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	97,70%	
		19. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan kinerja instansi pemerintah itu sendiri adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dengan indikator yang sifatnya terukur dan dapat diukur. Pertanggung jawaban pengukuran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dengan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator



kinerja sasaran. Untuk mempermudah menginterpretasikan atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro, diberlakukan nilai yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis, dengan nilai dan predikat sebagai berikut :

No	Nilai Angka	Predikat
1.	≥ 95	Sangat Berhasil
2.	80 s/d <95	Berhasil
3.	50 s/d < 80	Cukup Berhasil
4.	0 s/d < 50	Kurang Berhasil

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan kinerja tertentu yang terukur dan terencana. Sedangkan perencanaan itu sendiri merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan Pembangunan baik jangka panjang atau disebut dengan RPJPD maupun jangka menengah atau disebut dengan RPJMD yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah di setiap tahunnya maka perlu disusun perencanaan tahunan atau disebut dengan RKPD. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan yang disusun secara sistematis dan fleksibel namun tetap dijamin keselarasannya dengan RPJMD. Fleksibilitas penyusunan perencanaan tahunan bertujuan untuk mengakomodir isu-isu strategis terkini di masyarakat maupun mandatori khususnya yang bersifat urgent. Fleksibilitas juga bertujuan untuk merasionalisasi baik sumber daya yang akan dimanfaatkan maupun sasaran keberhasilan, indikator, dan target kinerja agar lebih efektif, efisien, terukur dengan baik dan logis untuk dapat dicapai.

Adapun Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3.1
Sasaran Strategis dan Target Kinerja Tahun 2023/24

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita ADHB	Rp. 39.125.120	Badan Pusat Statistik
2	Berkurangnya Beban Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan	Rp. 9.982.000	Badan Pusat Statistik
3	Menurunnya kantong-kantong kemiskinan	Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan	1,40%	Badan Pusat Statistik
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,59	Badan Pusat Statistik
5	Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,800	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		% Prevalensi Stunting	14%	
7	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	80,01%	Dinas Ketenagakerjaan
8	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	53	Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan)	5,78	Badan Pusat Statistik
10	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	Rp. 2.493.721.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0,3%	Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata
12	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	3,50	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat)	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP Kabupaten)	BB	Bagian Organisasi
13	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks BerAKHLAK	75	Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		IKM	87	Bagian Organisasi
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik	Capaian Kinerja RB Tematik	8,95	Bagian Organisasi



15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	0,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16	Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,83	Dinas Lingkungan Hidup

Dari sasaran strategis RPJMD yang diperjanjikan pada tahun 2024 di atas ditetapkan sebanyak 16 sasaran dengan 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IKU dipertimbangkan atas dasar tema pembangunan tahun 2024 yaitu **“Memantapkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Harmonisasi Sosial”**.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dari 16 sasaran strategis yang diperjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas dilakukan pengukuran realisasi IKU serta Indikator kinerja sasaran lainnya baik realisasi tahun pelaksanaan maupun capaian terhadap target serta analisisnya. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 2.3.2
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita ADHB	Rp. 39.125.120	Rp. 45.222.290	115%	Badan Pusat Statistik
2	Berkurangnya Beban Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan	Rp. 9.982.000	Rp. 10.156.000	102%	Badan Pusat Statistik, Bappeda
3	Menurunnya kantong-kantong kemiskinan	Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan	1,40%	1,48%	106%	Badan Pusat Statistik
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,59	0,581	98%	Badan Pusat Statistik
5	Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	53	57,91	109%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Meningkatnya	Indeks	0,800	0,829	103%	Dinas Kesehatan



	Derajat Kesehatan Masyarakat	Kesehatan % Prevalensi Stunting	14%	16,7	119%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	80,01%	78,16%	98%	Dinas Ketenagakerjaan
8	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	53	Belum bisa diukur dikarenakan belum adanya rencana aksi daerah sebagai tambahan domain perhitungan	Belum bisa diukur dikarenakan belum adanya rencana aksi daerah sebagai tambahan domain perhitungan	Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan)	5,78	3,77	65%	Badan Pusat Statistik
10	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	Rp. 2.493.721.000.000	Rp. 2.745.743.557.715	110%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0,3%	0,34%	113%	Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata
12	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	3,50	3,73	107%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat)	WTP	100	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP Kabupaten)	BB	BB	100%	Tim SAKIP Kabupaten
13	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks BerAKHLAK	75	72,4	97%	Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		IKM	87	88,76	102%	Bagian Organisasi
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik	Capaian Kinerja RB Tematik	8,95	8.98	100%	Bagian Organisasi
15	Meningkatnya	Indeks	0,75	0,75	100%	Dinas Pekerjaan



	Kualitas Infrastruktur	Infrastruktur				Umum dan Tata Ruang
16	Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,83	63,98	96%	Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel di atas dapat kami sampaikan bahwa rata-rata capaian realisasi kinerja IKU tahun 2024 sebesar 95,25%. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa capaian realisasi kinerja tahun 2024 dengan predikat **“Sangat Berhasil”**.

Realisasi Kinerja Persasaran

1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dengan indikator yaitu “Pendapatan Per Kapita ADHB” menghasilkan capaian kinerja sebesar sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.3
Realisasi Sasaran 1 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita ADHB	Rp. 39.125.120	Rp. 45.222.290	115%	BPS

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
Pendapatan per kapita ADHB pada tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp. 39.125.120 dan terelisasi sebesar (menunggu data dari BPS).

2. Berkurangnya Beban Pengeluaran

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Berkurangnya Beban Pengeluaran” dengan indikator yaitu “Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan” menghasilkan capaian kinerja sebesar 102% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.3.4
Realisasi Sasaran 2 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
2	Berkurangnya Beban Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan	Rp. 9.982.000	Rp. 10.156.000,-	102%	BPS

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan pada tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp. 9.982.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.156.000,- atau dengan capaian sebesar 102%.

3. Menurunnya Kantong-Kantong Kemiskinan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya kantong-kantong kemiskinan “ dengan indikator yaitu “ Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan“ sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.5
Realisasi Sasaran 3 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
3	Menurunnya kantong-kantong kemiskinan	Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan	1,40%	1,48%	106	BPS

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut: Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 1,40% dengan realisasi sebesar 1,48% atau dengan capaian sebesar 106%.

4. Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan“ dengan indikator yaitu “ Indeks Pendidikan “ sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.6
Realisasi Sasaran 4 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	



4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,59	0,581	98%	BPS
---	--	-------------------	------	-------	-----	-----

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
Indeks Pendidikan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,59 dengan realisasi sebesar 0,581 atau dengan capaian sebesar 98%.

5. Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat” dengan indikator yaitu “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat “ menghasilkan capaian kinerja sebesar 109 % sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.7
Realisasi Sasaran 5 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
5	Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	53	57,91	109%	Dinas Perpus Kearsipan

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 53 dan terealisasi dengan nilai 57,91% atau dengan capaian sebesar 109%.

6. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “ Meningkatkan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan 2 indikator yaitu “Indeks Kesehatan dan % Prevalensi Stunting” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.8
Realisasi Sasaran 6 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,800	0,829	103%	Dinkes P2KB
		% Prevalensi Stunting	14%	Belum Rilis	Belum Dapat dihitung	Dinkes P2KB



Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

a. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,800 dan terealisasi sebesar 0,829 atau dengan capaian sebesar 103%.

b. % Prevalensi Stunting

% Prevalensi Stunting pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 14% dan terealisasi sebesar atau dengan capaian sebesar .

7. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja” dengan indikator yaitu “Tingkat Partisipasi Angkatan kerja” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.9
Realisasi Sasaran 7 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
7	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	80,01%	78,16%	98%	Dinas Ketenagakerjaan

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian Tingkat Partisipasi Angkatan kerja pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 80,01% dan terealisasi sebesar 78,16% atau dengan capaian sebesar 98%.

8. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam pembangunan” dengan indikator yaitu “Indeks Pembangunan Pemuda” Belum bisa diukur dikarenakan belum adanya rencana aksi daerah sebagai tambahan domain sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.10
Realisasi Sasaran 8 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
8	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	53	Belum Bisa Diukur	Belum Bisa Diukur	Disbudporapar

9. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB



Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “ Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB “ dengan indikator yaitu “ Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan)” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.11
Realisasi Sasaran 9 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan)	5,78	Belum Rilis	Belum Rilis	BPS

Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan uraian bahwa target Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan) sebesar 5,78 dengan realisasi sebesar atau dengan capaian sebesar . %

10. Meningkatkan Realisasi Investasi

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Realisasi Investasi” dengan indikator yaitu “ Nilai realisasi investasi“ dengan capaian kinerja sebesar 110% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.12
Realisasi Sasaran 10 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
10	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat	Nilai Stabilitas Sosial	84,6	84,71	100,13	Bappeda

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

Nilai realisasi investasi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 2.493.721.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.745.743.557.715 atau dengan capaian sebesar 110%.

11. Meningkatkan Ekonomi Sektor Pariwisata



Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata” dengan indikator yaitu “Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD” menghasilkan capaian kinerja sebesar 113% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.13
Realisasi Sasaran 11 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
11	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0,3%	0,34%	113%	Budporapar

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 0,3% dan terealisasi sebesar 0,34% atau dengan capaian sebesar 113%.

12. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital Yang Efektif, Lincah, Dan Kolaboratif

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif “ dengan tiga indikator yaitu “Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat), Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP Kabupaten)” menghasilkan capaian kinerja berturut turut yaitu 107%, 100% (Capaian Tahun 2023), dan 100% (Capaian Tahun 2023) sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.14
Realisasi Sasaran 12 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
12	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	3,50	3,73	107%	Diskominfo
		Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat)	WTP	Belum Rilis	Belum Rilis	BKA
		Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP	BB	Belum Rilis	Belum Rilis	



		Kabupaten)				
--	--	------------	--	--	--	--

Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif yang terdiri dari :

1. Indeks SPBE

Indeks SPBE pada tahun 2024 ditargetkan dengan mencapai 3,50 dan terealisasi sebesar 3,73 dengan capaian sebesar 107%.

2. Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat)

Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat) pada tahun 2023 adalah WTP, untuk tahun 2024 belum rilis.

3. Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP Kabupaten)

Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP Kabupaten) pada tahun 2023 adalah B, untuk tahun 2024 belum rilis.

13. Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK Dengan ASN Yang Profesional

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dan Indeks BerAKHLAK dengan ASN yang profesional” yang terdiri dari 2 indikator yaitu “Indeks BerAKHLAK dan IKM “ yang menghasilkan capaian kinerja sebesar 97% dan 102% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.15
Realisasi Sasaran 13 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
13	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks BerAKHLAK	75	72,4	97%	BKPSDM
		IKM	87	88,76	102%	Bag. organisasi

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

Indeks BerAKHLAK pada tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 75 dan terealisasi sebesar 72,4 atau dengan capaian sebesar 97%, sedangkan pencapaian indikator untuk IKM ditargetkan dengan nilai 87 dan terlesasi sebesar 88,76 dengan capaian sebesar 102%.



14. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik” dengan indikator yaitu “Capaian Kinerja RB Tematik” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.16
Realisasi Sasaran 14 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik	Capaian Kinerja RB Tematik	8,95	Belum Rilis	Belum Rilis	

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
Capaian Kinerja RB Tematik pada tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 8,95 dan untuk realisasi masih belum dirilis.

15. Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur” dengan indikator yaitu “Indeks Indeks Infrastruktur” menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.17
Realisasi Sasaran 15 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	0,75	0,75	100%	PUTR

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
Indeks Indeks Infrastruktur pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 0,75 dan terealisasi sebesar 0,75 atau dengan capaian sebesar 100%.

16. Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup “ dengan indikator yaitu



“ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)“ menghasilkan capaian kinerja sebesar 96% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.18
Realisasi Sasaran 16 Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
14	Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,83	63,98	96%	DLH

Pencapaian indikator sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 66,83 dan terealisasi sebesar 63,98 atau dengan capaian sebesar 96%.

Dalam mendukung capaian kinerja di tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan berbagai inovasi antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.3.19
Inovasi Tahun 2024

No	NAMA INOVASI	DESKRIPSI	SKPD	BENTUK INOVASI	JENIS	URUSAN UTAMA
1	SIMPEL	Sistem informasi manajemen pengendalian evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah kabupaten Sumenep	Bappeda	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Perencanaan
2	LAYAK MANIS	Layanan Pensiun Duduk Manis	BKPSDM	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Kepegawaian
3	KARE MATOR	Karep Aladine Rekam Nompak Motor	Disdukcapil	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kependudukan
4	APLIKASI SIAP LAHIR	Aplikasi Dokumen Kependudukan bayi baru lahir	Dinkes P2KB	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kesehatan
5	BERANI SIMPEL	Bismillah Gerakan Melayani Simpanan Pelajar	BPRS Bhakti Sumekar	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Perbankan
6	APLIKASI SARONIN	Sarana Komunikasi dan Informasi Internal	Inspektorat	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kepegawaian
7	LAKAR BERES	Layanan Kesehatan jiwa Remaja Bersama Sekolah	Puskesmas pamolokan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
8	SILAHKAN	Sistem Informasi	BKPSDM	Inovasi Tata	Digital	Kepegawaian



		Layanan Harian Kepegawaian		Kelola pemerintahan Daerah		
9	YUTUBER KELILING	Layanan Tuberkulosis Berkeliling	Puskesmas pamolokan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
10	MRS	Medical Record Spotler	Inspektorat	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	
11	HAPE SUSU	Halo Pelanggan Serap Masukan	Puskesmas dungkek	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
12	ELIT TEMULAWAK	Eleminasi Tuberculosis dengan investigasi kontak dan minum temulawak	Puskesmas pandian	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
13	GARDU BARELA	Gerakan terpadu peningkatan kesehatan bagi balita, remaja, dan lansia di Desa Aeng Panas	Puskesmas pragaan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
14	ASSALAMUALAI KUM SELANTANG	Alonggu Sareng Lansia Monggu a Sakola a Kompole Selantang	Puskesmas Pragaan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
15	JUMPA BU SADIS	Jumat Minggu Ke Empat Buang sampah medis	Puskesmas Rubaru	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
16	MAPAN BERDASI	Masyarakat kecamatan pasongsongan bersama mengendalikan penyakit hipertensi	Puskesmas Pasongsongan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
17	BISIK	Bincang asyik seputar informasi kesehatan	Puskesmas Legung	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kesehatan
18	GETAS POTE SAEBU	Gerakan terpadu masyarakat pengobatan TB sampai sembuh	Puskesmas Bluto	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
19	KANCIL KABBI ASAPOK	Kader cilik keluarga bebas asap rokok	Puskesmas Bluto	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
20	JUMPA SAFERA	Jumat sarapan dan minum fe bersama	Puskesmas Guluk Guluk	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kesehatan
21	PAK GANTENG	Periksa antarkan konseling keluarga dengan darah tinggi	Puskesmas Guluk Guluk	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
22	KENCAN BERDUA	Kelas bimbingan calon penganten berkualitas, terpadu dan aktif	Puskesmas Ambunten	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
23	Merancang dan Membangun Cooling Box Feat Bagan Underwater	Perancangan cooling box yang dikombinasikan dengan sistem turbin bawah laut dan panel surya yang memberikan ketersediaan listrik dan peningkatan	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	TTG Non Digital	Perikanan



		hasil tangkapan ikan				
24	Eksplorasi potensi tanaman liar pulau kangean	Produk dan canggeret dirancang dengan mempertimbangkan aspek rasa dan kandungan gizi yang tinggi sehingga menjadi alternatif sebagai penyedap rasa yang aman dan sehat	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	TTG Non Digital	Ketahanan Pangan
25	E-Commerce Berung Madhure	Platform digital yang dirancang khusus untuk memfasilitasi penjualan produk UMKM di Sumenep	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	TTG
26	Alternatif pengobatan penyakit	Mengetahui kandungan senyawa pasir yang bermanfaat bagi tubuh sehingga dapat menjadi alternatif pengobatan penyakit	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Non Digital	Kesehatan
27	Sistem monitoring prototype rumah garam	Monitoring prototype rumah garam model hybrid	Masyarakat	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	TTG Digital	Garam
28	BALING BALING SETAN		Puskesmas Batuputih	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
29	SUKMA PUTI	Masuk rumah puntung rokok mati	Puskesmas Rubaru	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
30	MARLINA SEKSI	Mari peduli anak stunting	Puskesmas Ra'as	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Kesehatan
31	PEDULI RASA	Pelayanan terpadu lansia ramah dan santun	Puskesmas Masalembu	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
32	DPPP	Digitalisasi pemasaran produk pertanian	Disperta	Inovasi Pelayanan Publik (Pangan)	Digital	Pangan
33	KACA CENTING	Kawal catin cegah stunting	Puskesmas Saronggi	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kesehatan
34	KOPI DIET	Kontrol hipertensi dan diabetes melitus	Puskesmas Moncek Tengah	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan
35	SEJATI	Sehat jiwa dan produktif	Puskesmas Saronggi	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kesehatan
36	KASIH SEIBA	Pekarangan sehat	Puskesmas	Inovasi	Non	Kesehatan



	TERPADU	selamatkan ibu & bayi	Gapura	Pelayanan Publik	Digital	
37	SI LAHAN	Sistem informasi spasial lahan pertanian	Disperta	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Digital	Pangan
38	PENYULUH PERTANIAN DENGAN METODE PODCAST DI BPP GAPURA		Disperta	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Non Digital	Pangan
39	MATCHA	Mari cari tahu tentang farmasi	Puskesmas Pamolokan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja per sasaran 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel dan analisisnya berikut :

Tabel 2.3.20
Perbandingan Sasaran 3 Tahun terakhir

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita ADHB	Rp. 24.912,62	Rp. 26.244,79	Belum Rilis
2	Berkurangnya Beban Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan	Rp. 9.388.000	Rp. 9.807.000,-	Rp. 10.156.000,-
3	Menurunnya kantong-kantong kemiskinan	Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan	NA	NA	1,48%
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,573	0,575	0,581
5	Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	52	47,09	57,91
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8	0,826	0,829
		% Prevalensi Stunting	-	16,70%	Belum Rilis
7	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	75,12%	78,86%	78,16%
8	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	-	-	Belum bisa diukur dikarenakan belum adanya rencana aksi daerah



					sebagai tambahan domain perhitungan
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan)	5,78	4,95	Belum Rilis
10	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	Rp. 1.777.132.906.076	Rp. 2.101.692.051.534,-	Rp. 2.745.743.557.715
11	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0,30%	0,21%	0,34%
12	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	2,05	3,18	3,73
		Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat)	WTP	WTP	Belum Rilis
		Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP Kabupaten)	B (68,86)	B (68,61)	BB
13	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks BerAKHLAK	63,9	62,4	72,4
		IKM	87	84,15	88,76
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik	Capaian Kinerja RB Tematik	Tidak ada penilaian	8,70	Belum Rilis
15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	0,72	0,73	0,75
16	Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,2	63,71	63,98

1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Tabel 2.3.21
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita ADHB	Rp	Rp. 24.912,62	Rp. 26.244,79	Belum Rilis

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Pendapatan per kapita ADHB di Kabupaten Sumenep dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, Pendapatan per kapita ADHB pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.535,17 dari tahun 2022 .

2. Berkurangnya Beban Pengeluaran



Tabel 2.3.22
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024
2	Berkurangnya Beban Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan	Rp	9.388.000	9.807.000,-	10.156.000,

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan tahun 2023 yang meningkat 419.000 jika dibandingkan dengan capaian Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan tahun 2022 dan Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 349.000 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan 2 tahun terakhir sebesar 384.000.

3. Menurunnya Kantong-Kantong Kemiskinan

Tabel 2.3.23
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024
3	Menurunnya kantong-kantong kemiskinan	Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan	%	NA	NA	1,48%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan belum dapat diukur dikarenakan tidak ada data pembanding untuk tahun 2022 dan 2023. Capaian untuk tahun 2024 adalah sebesar 1,48%.

4. Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan

Tabel 2.3.24
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024



4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,573	0,575	0,581
---	--	-------------------	--------	-------	-------	-------

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja indeks pendidikan di Kabupaten Sumenep dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, indeks pendidikan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,002 dari tahun 2022 dan pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 0,006 dari tahun 2023. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Pendidikan 2 tahun terakhir sebesar 0,004.

5. Meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat

Tabel 2.3.25
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024
5	Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	52	47,09 Perlu Konfirm	57,91

Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,91 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sedangkan dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,82 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dengan demikian capaian rata-rata Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2 tahun terakhir Mengalami peningkatan sebesar 2,955.

6. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 2.3.26
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALIASI		
				2022	2023	2024
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		0,8	0,826	0,829
		% Prevalensi Stunting		-	16,70%	Belum Rilis

- a. Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja indeks kesehatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja indeks kesehatan tahun 2023 yang meningkat 0,026 jika dibandingkan dengan capaian indeks kesehatan tahun 2022 dan indeks kesehatan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan



sebesar 0,003 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Kesehatan 2 tahun terakhir sebesar 0,0145.

- b. Indikator % Prevalensi Stunting belum bisa dilakukan perbandingan dikarenakan pada tahun 2022 dan 2023 belum dilakukan perhitungan prevalensi stunting.

7. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 2.3.27
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024
7	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Indeks	75,12%	78,86%	78,16%

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan kerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,74 jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,7 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Tingkat Partisipasi Angkatan kerja 2 tahun terakhir Mengalami Peningkatan sebesar 1,52.

8. Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan

Tabel 2.3.28
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024
8	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	-	-	Belum bisa diukur dikarenakan belum adanya rencana aksi daerah sebagai tambahan domain perhitungan

Indeks Pembangunan Pemuda belum bisa dilakukan perbandingan dikarenakan pada tahun 2022 dan 2023 belum dilakukan perhitungan serta tahun 2024 Belum bisa diukur dikarenakan belum adanya rencana aksi daerah sebagai tambahan domain perhitungan.

9. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB

Tabel 2.3.29
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI
----	---------	-----------	--------	-----------



	STRATEGIS	KINERJA		2022	2023	2024
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan)		5,78	4,95	Belum Rilis

Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan) belum bisa dilakukan perhitungan karena data capaian untuk tahun 2024 belum dirilis. Sedangkan untuk tahun 2023, capaian laju pertumbuhan PDRB menurun 0,81 dibandingkan dengan tahun 2022.

10. Meningkatnya Realisasi Investasi

Tabel 2.3.30
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024
10	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	Rp	1.777.132.906.076	2.101.692.051.534,-	2.745.743.557.715

Indikator Nilai realisasi investasi Pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 644.051.506.181 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan capaian tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 324.559.145.458 Jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Nilai realisasi investasi 2 tahun terakhir Mengalami Peningkatan sebesar Rp. 484.305.325.819,5.

11. Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata

Tabel 2.3.31
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 Terhadap Tahun Sebelumnya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024
11	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	0,30%	0,21%	0,34%

Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,04% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,09%



dari tahun 2022. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD 2 tahun terakhir Mengalami Penurunan sebesar 0,025%.

12. Terciptanya Tata kelola Pemerintahan Digital Yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif

Tabel 2.3.32
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024
12	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE		2,05	3,18	3,73
		Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat)		WTP	WTP	Belum Rilis
		Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP Kabupaten)		B	BB	Belum Rilis

- Indeks SPBE pada tahun 2023 mengalami Peningkatan sebesar 1,13 dari tahun 2022 dan pada tahun 2024 juga mengalami Peningkatan sebesar 0,55 dari tahun 2023. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks SPBE 2 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,84.
- Indikator Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat) dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah WTP, sedangkan tahun 2024 masih belum ada data dikarenakan belum rilis.
- Indikator Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP Kabupaten) terus mengalami peningkatan, tahun 2022 mendapatkan nilai B sedangkan untuk tahun 2023 mendapatkan Nilai BB, untuk tahun 2024 menunggu rilis data terbaru.

13. Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

Tabel 2.3.33
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024
13	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks BerAKHLAK		63,9	62,4	72,4



		IKM		87	84,15	88,76
--	--	-----	--	----	-------	-------

- a. Indikator Indeks BerAKHLAK pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,5 jika dibandingkan dengan tahun 2022, sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 10 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dengan demikian capaian rata- rata Indikator Indeks BerAKHLAK 2 tahun mengalami peningkatan sebesar 4,25.
- b. Indikator IKM pada 2023 mengalami penurunan sebesar 2,85 jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,61 jika dibandingkan dengan tahun 2023 Dengan demikian capaian rata- rata indikator Nilai IKM 2 tahun terakhir Mengalami Peningkatan sebesar 0,88.

14. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik

Tabel 2.3.34
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik	Capaian Kinerja RB Tematik		Tidak ada penilaian	8,70	Belum Rilis

- a. Indikator Capaian Kinerja RB Tematik belum bisa dilakukan pengukuran karena penilaian untuk tahun 2024 belum keluar sedangkan untuk tahun 2022 tidak ada penilaian.

15. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Tabel 2.3.35
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024
15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur		0,72	0,73	0,75

- a. Indikator Indeks Infrastruktur pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,01 jika dibandingkan dengan tahun 2022, sedangkan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 0,02 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dengan demikian capaian rata- rata Indikator Indeks



Infrastruktur 2 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,015.

16. Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 2.3.36
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 Terhadap Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2022	2023	2024
16	Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		65,2	63,71	63,98

- a. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,49 jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,27 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dengan demikian capaian rata-rata indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2 tahun terakhir Mengalami Penurunan sebesar 0,61.

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Capaian kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir RPJMD, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.37
Perbandingan realisasi dengan RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD (%)	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita ADHB	Rp. 21.763.582	Belum Rilis	Belum Rilis	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik
2	Berkurangnya Beban Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan	10.134.705	Rp. 10.156.000,-	100%	Badan Pusat Statistik, Bappeda	Badan Pusat Statistik, Bappeda
3	Menurunnya kantong-kantong kemiskinan	Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan	-	1,48%	Belum Rilis	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik



4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,607	0,581	96%	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik
5	Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10	57,91	Catatan (di RPJMD)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,810	0,829	102%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		% Prevalensi Stunting	-	Belum Rilis	Belum Rilis		
7	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	75,25%	78,16%	104%	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
8	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	55	Belum bisa diukur dikarenakan belum adanya rencana aksi daerah sebagai tambahan domain perhitungan	Belum bisa diukur dikarenakan belum adanya rencana aksi daerah sebagai tambahan domain perhitungan	Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan)	Rp. 8.308.934	Belum Rilis	-	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik
10	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	Rp.3.000.000.000.000	Rp. 2.745.743.557.715	91,5%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0,50%	0,34%	68%	Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata
12	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	2,6	3,73	143%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat)	WTP	WTP	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai)	A	BB	-	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi



		SAKIP Kabupaten)					
13	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks BerAKHLAK	67	72,4	108%	Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		IKM	88	88,76	101%	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik	Capaian Kinerja RB Tematik	8,80	Belum Rilis	-	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	0,77	0,75	97%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16	Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,95	63,98	94%	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Tabel 2.3.38
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita ADHB	Rp. 21.763.582	Belum Rilis	Belum Rilis	BPS

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan per kapita ADHB sampai dengan tahun 2024 menunggu rilis dari BPS, sedangkan target akhir RPJMD sebesar Rp. 21.763.582 sehingga belum bisa dilakukan perbandingan.

2. Berkurangnya Beban Pengeluaran

Tabel 2.3.39
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER
-----	---------	-----------	--------	-----------	---------	--------



	STRATEGIS	KINERJA	KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	S/D TAHUN 2024	TERHADAP AKHIR RPJMD	DATA
2	Berkurangnya Beban Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan	10.134.705	Rp. 10.156.000,-	100%	BPS

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan sampai dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 10.156.000,-sedangkan target akhir RPJMD sebesar Rp. 10.134.705 Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2024 maka tercapai sebesar 100%.

3. Menurunnya Kantong-Kantong Kemiskinan

Tabel 2.3.40
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
3	Menurunnya kantong-kantong kemiskinan	Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan	-	1,48%	-	BPS

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

Pada Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan realisasi sampai dengan tahun 2024 adalah 1,48%.

4. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan

Tabel 2.3.41
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2023	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,607	0,581	96%	BPS



--	--	--	--	--	--	--

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

Realisasi Indeks Pendidikan sampai dengan tahun 2024 sebesar 0,581, sedangkan target akhir RPJMD sebesar 0,607. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2024 maka tercapai sebesar 96%.

5. Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat

Tabel 2.3.42
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2023	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
5	Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10	57,91	-	Perpus

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sampai dengan tahun 2024 sebesar 57,91 sedangkan target akhir RPJMD sebesar 10 .

6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 2.3.43
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan % Prevalensi Stunting	0,810 -	0,829 Belum Rilis	102% Belum Rilis	BPS Dinkes P2KB

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

1. Indeks Kesehatan realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 0,829 sedangkan target akhir RPJMD sebesar 0,810. Jika dilakukan



pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2024 maka tercapai sebesar 102%.

7. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 2.3.44

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
7	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	75,25%	78,16%	104%	Dinas Ketenagakerjaan, BPS Provinsi

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan kerja realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 78,16% sedangkan target akhir RPJMD adalah 75,25%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2024 maka tercapai sebesar 104%.

8. Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan

Tabel 2.3.45

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
8	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	55	Belum bisa diukur dikarenakan belum adanya rencana aksi daerah sebagai tambahan domain perhitungan	Belum bisa diukur dikarenakan belum adanya rencana aksi daerah sebagai tambahan domain perhitungan	BKN

Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

Pada Indeks Pembangunan Pemuda sampai dengan realisasi tahun 2024 Belum bisa diukur dikarenakan belum adanya rencana aksi daerah sebagai



tambahan domain perhitungan.

9. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB

Tabel 2.3.46

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan)	Rp. 8.308.934	Belum Rilis	-	-

Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB didukung indikator Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan) dengan capaian belum dapat dilakukan perbandingan dikarenakan data capaian belum rilis.

10. Meningkatnya Realisasi Investasi

Tabel 2.3.47

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
10	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	Rp.3.000.000.000.000	Rp. 2.745.743.557.715	91,5%	-

Pengukuran Meningkatnya Realisasi Investasi didukung 1 indikator yaitu Nilai realisasi investasi. Adapun capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 adalah Rp. 2.745.743.557.715. sedangkan target akhir RPJMD sebesar Rp.3.000.000.000.000 Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2024 maka tercapai sebesar 91,5%.

11. Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata



Tabel 2.3.48

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 11 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
11	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	0,50%	0,34%	68%	Disbudporapar

Pengukuran Meningkatnya Solidaritas Sosial Di Masyarakat didukung 1 indikator, adapun capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

Pada Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap yang diperoleh Kabupaten Sumenep sebesar 0,34%. sedangkan target akhir RPJMD adalah 0,50%. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2024 maka tercapai sebesar 68%.

12. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital Yang Eektif, Lincah, dan Kolaboratif

Tabel 2.3.49

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 12 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
12	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	2,6	3,73	143%	
		Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat)	WTP	Belum rilis	Belum rilis	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP Kabupaten)	A	BB	Belum rilis	



Pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

1. Pada Indeks SPBE sampai dengan realisasi tahun 2024 sebesar 3,73 sedangkan target akhir RPJMD sebesar 2,6. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2024 maka tercapai sebesar 143%.
2. Pada Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat) pada tahun 2024 belum rilis. sedangkan target akhir RPJMD dengan predikat WTP. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2024 belum bisa diukur.
3. Pada Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP Kabupaten) yang diperoleh Kabupaten Sumenep belum rilis.

13. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

Tabel 2.3.50

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 13 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
13	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks BerAKHLAK	67	72,4	108%	
		IKM	88	88,76	101%	

Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata dalam kehidupan Masyarakat didukung 2 indikator, adapun capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

1. Pada Indeks BerAKHLAK yang diperoleh Kabupaten Sumenep sebesar 72,4. sedangkan target akhir RPJMD sebesar 67. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2024 maka tercapai sebesar 108 %.
2. Capaian Realisasi Nilai IKM Kabupaten Sumenep sebesar 88,76, sedangkan target akhir RPJMD sebesar 88. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2024 maka tercapai sebesar 101%.



14. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik

Tabel 2.3.51
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 14 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik	Capaian Kinerja RB Tematik	8,80	Belum Rilis	-	

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik didukung 1 indikator, adapun capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

Pada Capaian Kinerja RB Tematik yang diperoleh Kabupaten Sumenep belum rilis sedangkan target akhir RPJMD sebesar 8,80.

15. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Tabel 2.3.52
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 15 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	0,77	0,75	97%	Dinas PUTR

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur didukung 1 indikator, adapun capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

Pada Indeks Infrastruktur yang diperoleh Kabupaten Sumenep sebesar 0,75. sedangkan target akhir RPJMD sebesar 0,77. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2024 maka tercapai sebesar 97%.

16. Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 2.3.53



Capaian Indikator Kinerja Sasaran 16 Terhadap Akhir Periode RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2024	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
16	Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,95	63,98	94%	DLH

Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup didukung 1 indikator, adapun capaian indikator kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

Pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diperoleh Kabupaten Sumenep sebesar 63,98. sedangkan target akhir RPJMD sebesar 67,95. Jika dilakukan pengukuran capaian kinerja akhir periode RPJMD atas capaian sampai dengan 2024 maka tercapai sebesar 94%

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara capaian keluaran dan penyerapan anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NE = (\text{Realisasi Anggaran/Alokasi}) / (\text{Realisasi Kinerja/Target Kinerja}) * 100$$

Selanjutnya menentukan kategori nilai efisiensi dengan kriteria: nilai efisiensi lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien; nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien; nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, pelaksanaan anggaran



dikatakan cukup efisien, nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien dan nilai efisiensi dibawah 50%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.

1) Meningkatnya pendapatan masyarakat

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi pencapaian IKU yang disajikan di bawah ini :

Tabel 2.3.54
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita ADHB	Rp	Rp. 39.125.120	Belum Rilis	Belum Rilis	Rp. 2.705.885.902,00	Rp. 2.653.093.427,00	98,05%	-

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi dalam pencapaian Pendapatan per kapita ADHB belum dapat ditentukan dikarenakan menunggu realisasi dan capaian yang dikeluarkan oleh BPS.

2) Berkurangnya Beban Pengeluaran

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi pencapaian IKU. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Berkurangnya Beban Pengeluaran sebagai berikut :

Tabel 2.3.54
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
2	Berkurangnya Beban Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan	Rp.	Rp. 9.982.000	Rp. 10.156.000	102%	Rp. 92.571.520	Rp. 63.906.000	69,03%	67,67%



Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Berkurangnya Beban Pengeluaran adalah sebesar 67,67% sehingga sasaran ini dicapai dengan **Cukup Efisien**.

3) Menurunnya Kantong-Kantong Kemiskinan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Menurunnya kantong-kantong kemiskinan sebagai berikut:

Tabel 2.3.55

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
3	Menurunnya kantong-kantong kemiskinan	Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan	1,40%	1,48%	106%	479.808.607.459	455.360.012.820	95%	90%

Sasaran strategis Menurunnya kantong-kantong kemiskinan didukung 1 (Satu) indikator yaitu Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan dengan tingkat efisiensi sebesar 90%. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Menurunnya kantong-kantong kemiskinan adalah sebesar 90% sehingga sasaran ini dicapai dengan **Efisien**.

4) Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis efisiensi Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.56

Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	



4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,59	0,581	98%	Rp. 379.187.512.177	Rp. 359.966.646.366	94,93%	97%
---	--	-------------------	--------	------	-------	-----	---------------------	---------------------	--------	-----

Sasaran strategis Menurunkan Kesenjangan didukung 1 (Satu) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain Indeks Pendidikan sebesar 97% sehingga sasaran ini dicapai dengan **Sangat Efisien**.

5) Meningkatkan Budaya literasi Masyarakat

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Budaya literasi Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.3.57
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
5	Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	53	57,91	109%	2.765.094.480	2.399.072.121	86,76%	79,6%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Budaya literasi Masyarakat adalah sebesar 79,6%. Sasaran ini didukung dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang mencapai 109% sehingga sasaran ini dicapai dengan **Cukup Efisien**.

6) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.3.58
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
6	Meningkatnya	Indeks Kesehatan	Indeks	0,800	0,829	103%	228.313.479.7	218.330.425.	95,63%	108,37%



Derajat Kesehatan Masyarakat	% Prevalensi Stunting	%	14%	Belum Rilis	Belum Rilis	88	854		
------------------------------	-----------------------	---	-----	-------------	-------------	----	-----	--	--

Sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat didukung 2 (Dua) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain, Indeks Kesehatan dan Prevalensi Stunting Sebesar 108,37%. sehingga sasaran ini dicapai dengan **Sangat Efisien**.

7) Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja sebagai berikut :

Tabel 2.3.59
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyeapan Anggaran	
7	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	%	75,25%	78,16%	104%	21.126.723.688	20.314.819.270	96,16%	92%

Sasaran strategis Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja didukung 1 (Satu) indikator dengan rincian tingkat efisiensi yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan kerja sebesar 92% sasaran ini dicapai dengan **Sangat Efisien**

8) Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2.3.60
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 8

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
8	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53	Belum bisa diukur dikarenakan belum adanya rencana aksi daerah		Rp. 10.341.831.735	Rp. 10.273.085.293	99,33%	



					sebagai tambahan domain perhitungan					
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam pembangunan belum bisa dihitung dikarenakan realisasi kinerja belum bisa diukur dikarenakan belum adanya rencana aksi daerah sebagai tambahan domain perhitungan

9) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Terhadap PDRB

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB sebagai berikut :

Tabel 2.3.61
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 9

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi(Rp)	Realisasi(Rp)	Penyerapan Anggaran	
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB sektor unggulan (pertanian, perikanan, perindustrian dan perdagangan)	%	5,78	Belum Rilis	Belum Rilis	Rp.17.458.997.342	Rp.16.017.567.739,68	91,74%	

Sasaran strategis terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan transparan didukung belum bisa dihitung tingkat efisiensinya dikarenakan realisasi kinerja masih menunggu rilis dari BPS.

10) Meningkatnya Realisasi Investasi

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi sebagai berikut :

Tabel 2.3.62
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 10

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	



10	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	Rp	Rp. 2.493.721.000.00	Rp. 2.745.743.557.715	110%	1.167.626.088	1.017.605.612	87,15	79,22%
----	----------------------------------	---------------------------	----	----------------------	-----------------------	------	---------------	---------------	-------	--------

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Realisasi Investasi adalah sebesar 79,22%. Sasaran ini didukung dengan indikator Nilai realisasi investasi yang mencapai 110% sehingga sasaran ini dicapai dengan **Cukup Efisien**.

11) Meningkatkan Ekonomi Sektor Pariwisata

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Ekonomi Sektor Pariwisata sebagai berikut :

Tabel 2.3.63
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 11

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
11	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	0,3%	0,34%	113%	Rp. 4.849.352.208,00	Rp. 4.807.559.907,00	99,13%	87,72%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Meningkatkan Ekonomi Sektor Pariwisata adalah sebesar 87,72% Sasaran ini didukung dengan indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD yang mencapai 113% sehingga sasaran ini dicapai dengan **Efisien**.

12) Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital Yang efektif, lincah, dan kolaboratif

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai berikut .

Tabel 2.3.64
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 12

				Kinerja	Anggaran	
--	--	--	--	---------	----------	--



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
12	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE		3,50	3,73	107%	6.354.920.210	5.973.083.477	93,99%	87,84%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat)		WTP	Belum Rilis	Belum Rilis	-	-	-	-
		Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP Kabupaten)		BB	Belum Rilis	Belum Rilis	Rp. 28428735564	Rp. 26150615007	-	-

Sasaran Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif didukung 3 (tiga) indikator dengan rincian tingkat efisiensi antara lain, Indeks SPBE sebesar 87,84% atau dicapai dengan **Efisien**. Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat) belum dapat dihitung karena belum rilis, dan Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP Kabupaten) belum dapat dihitung karena belum rilis.

13) Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK Dengan ASN yang Profesional

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai berikut :

Tabel 2.3.65
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 13

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penerapan Anggaran	
13	Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks BerAKHLAK	Nilai	75	72,4	97%	143.000.000	139.138.580	97%	100%
		IKM	Nilai	87	88,76	102%	52.267.200	52.267.200	100%	98%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional adalah sebesar Sasaran ini didukung dengan indikator Indeks BerAKHLAK yang mencapai 100% dan IKM yang mencapai 98% sehingga sasaran ini dicapai dengan **Sangat Efisien**.



14) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik sebagaiberikut.

Tabel 2.3.66
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 14

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
14	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik	Capaian Kinerja RB Tematik	-	8,95	Belum Rilis	Belum Rilis				

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik adalah sebesar Sasaran ini didukung dengan indikator Capaian Kinerja RB Tematik yang mencapai sehingga sasaran ini dicapai dengan.

15) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai berikut.

Tabel 2.3.67
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 15

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
15	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,75	0,75	100%	232.249.394.492	224.199.850.339	96,53%	96,53%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur adalah sebesar



96,53%. Sasaran ini didukung dengan indikator Indeks Infrastruktur yang mencapai 100% sehingga sasaran ini dicapai dengan **Sangat Efisien**.

16) Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup sebagaiberikut.

Tabel 2.3.68
Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 16

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan Anggaran	
14	Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,83	63,98	96%	17.893.011.070	17.731.033.624	99%	103%

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar 103%. Sasaran ini didukung dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencapai 96% sehingga sasaran ini dicapai dengan **Sangat Efisien**.

F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG Mendukung Pencapaian Target Kinerja Beserta Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Pendapatan per kapita ADHB

2. Berkurangnya Beban Pengeluaran

Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan

3. Menurunnya Kantong-Kantong Kemiskinan



Persentase Pengurangan wilayah Kantong Kemiskinan

4. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan

Indeks Pendidikan didukung oleh meningkatnya kenaikan Rata-Rata lama sekolah.

5. Meningkatnya Budaya literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi masyarakat didukung oleh peningkatan jumlah perpustakaan sekolah dan desa serta peningkatan kunjungan di perpustakaan daerah baik secara online maupun onsite. Sedangkan faktor penghambat nya adalah belum tersedianya data perpustakaan di wilayah kepulauan.

6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

a. Indeks Kesehatan

Capaian realisasi indeks kesehatan didukung oleh derajat kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan, dan genetik (turunan).

b. % Prevalensi Stunting

7. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja Di Kabupaten Sumenep didukung oleh pelaksanaan kerjasama dengan pihak pemberi kerja melalui kegiatan job fair dan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.

Adapun faktor penghambat adalah sebagai berikut:

1. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 berkurang 3.096 orang menjadi sebanyak 727.652 orang dibandingkan Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 78,16 persen, turun 0,70 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2023.
2. Penduduk yang bekerja sebanyak 715.391 orang atau berkurang 2.894 orang dibandingkan Agustus 2023. Sektor Manufaktur



mengalami pengurangan jumlah pekerja terbanyak yaitu berkurang sebesar 13.965 orang diikuti sektor Pertanian berkurang sebesar 10.966 orang dan sektor Jasa bertambah sebesar 5.893 orang.

3. Sebanyak 186.901 orang (26,13 persen) bekerja pada kegiatan formal atau naik 6,22 persen dibandingkan Agustus 2023.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 1,69 persen atau turun 0,02 persen dibandingkan Agustus 2023.
5. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki TPT tertinggi di Kabupaten Sumenep sebesar 8,07 persen di susul lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 4,57 persen.
6. peningkatan penduduk usia kerja yang telah menyelesaikan pendidikan.
7. penurunan serapan tenaga kerja oleh perusahaan.

8. Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Indeks Pembangunan Pemuda

Faktor penghambat atas indeks pembangunan pemuda antara lain adalah adanya perubahan regulasi terkait tambahan domain perhitungan indeks pembangunan pemuda dan belum ditetapkannya rencana aksi daerah kepemudaan.

9. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan terhadap PDRB

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (pertanian, Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan).

10. Meningkatnya Realisasi Investasi

Nilai realisasi investasi

Nilai realisasi investasi didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Nilai investasi meningkat karena dukungan dari para pelaku usaha umkm yg melakukan pengurusan perizinan berusaha semakin meningkat dengan seiring menjamurnya pelaku usaha kecil/umkm di Kab Sumenep;
2. Pelaksanaan kalender event yang melibatkan pelaku usaha UMKM;
3. tersedianya fasilitas berusaha bagi pelaku usaha UMKM;



4. Pembangunan infrastruktur Pemerintah;
5. Kemudahan berusaha.

Sedangkan untuk faktor penghambat adalah kurangnya pemahaman dari pelaku usaha dalam proses perijinan melalui sistem online (OSS).

11. Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD

Faktor pendukung atas kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD antara lain:

1. Kenaikan tarif retribusi daerah sesuai Perda No. 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah.
2. Kenaikan jumlah pengunjung wisata di objek pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
3. Penggunaan transaksi elektronik (e-TPD) dalam pembayaran retribusi daerah di objek pariwisata yang dikelola oleh Pemda.

Adapun faktor penghambatnya adalah masih ada resistensi kenaikan tarif retribusi sesuai Perda No. 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah.

12. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital Yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif

a. Indeks SPBE

Faktor pendukung kenaikan indeks SPBE antara lain adalah :

1. Pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE semua indikator sangat kuat atau menjadi kekuatan dalam penerapan aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan rata-rata tingkat kematangan level 4.
2. Belum adanya kekuatan yang signifikan dalam penerapan aspek Kebijakan Perencanaan Strategis SPBE seperti Tingkat kematangan arsitektur SPBE, peta rencanan, rencanan dan anggaran serta inovasi proses bisnis Pemerintah Kabupaten sumenep dengan rata-rata tingkat kematangan level 3



3. Belum nampak kekuatan namun beberapa peluang kekuatan dalam penerapan tata kelola aspek teknologi informasi dan komunikasi seperti Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, jaringan intra serta sistem penghubung Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah diterapkan dengan rata-rata tingkat kematangan level 3.
4. Sudah terlihat kekuatan dalam penerapan tata kelola aspek penyelenggaraan SPBE yaitu Kolaborasi penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah diterapkan secara penuh baik untuk Tim Koordinator maupun Kolaborasi Penerapan SPBE.
5. Pada aspek penerapan manajemen SPBE yang terlihat yang menjadi kekuatannya ada pada Penerapan Manajemen Resiko.
6. Belum terlihat yang menjadi indikator kekuatan belum terlalu nampak karena baru sampai tingkat kematangan 2 rata-rata tingkat kematangan 2.
7. Beberapa kekuatan dalam layanan adm seperti Layanan perencanaan, Kearsipan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan barang dan jasa dan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah diterapkan dengan rata-rata tingkat kematangan level 4.
8. Semua aspek menjadi kekuatan dalam layanan publik SPBE seperti layanan pengaduan pelayanan, layanan data terbuka, layanan publik sektor 1 dan 3, serta JDIH dan layanan publik sektor 2 Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah diterapkan dengan rata-rata tingkat kematangan level 4.

Faktor penghambat indeks SPBE antara lain adalah :

1. Kabupaten Sumenep masih terdapat beberapa kelemahan, yang masih bisa ditingkatkan yaitu pada indikator Peta Rencana, rencana dan anggaran serta inovasi proses bisnis belum mencakup seluruh aspek dan belum adanya review terhadap aspek-aspek tersebut.



2. Semua masuk dalam peluang peningkatan Kabupaten Sumenep masih perlu ditingkatkan dalam semua aspek pelaksanaan Audit TIK baik itu audit infrastruktur, aplikasi maupun keamanan karena belum dilakukan audit oleh eksternal audit dan belum adanya reviu terhadap ketiga aspek audit tersebut.
3. Perlu adanya perbaikan pemerintah kabupaten Sumenep pada layanan administrasi SPBE terkhusus pada pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan barang milik negara.

b. Capaian Akuntabilitas Keuangan (Predikat)

Faktor pendukung antara lain adalah:

1. Pengelolaan keuangan sudah melakukan aplikasi sehingga dapat mempercepat penyusunan LKPD
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang dilakukan setiap tahun

Adapun faktor penghambat adalah masih ada temuan berulang berupa tata kelola aset.

c. Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat/nilai SAKIP Kabupaten)

Faktor pendukung antara lain adalah:

1. Penyelesaian pohon kinerja kabupaten dan OPD.
2. Penggunaan aplikasi simpel dalam perencanaan dan pengukuran kinerja.
3. Meningkatnya kualitas evaluasi internal.

Faktor penghambat antara lain pengukuran kinerja individu masih berupa aktivitas kerja, belum menggambarkan dukungan kinerja individu terhadap pencapaian kinerja organisasi.

13. Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

a. Indeks BerAKHLAK

Penilaian indeks BerAKHLAK merupakan hasil penilaian dari dua komponen yaitu hasil Survei BerAKHLAK dan hasil Evaluasi Organisasi.



Dari masing-masing komponen tersebut terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan/kegagalan, yaitu :

A. Faktor Keberhasilan

1. Survei BerAKHLAK

Faktor keberhasilan terlaksananya survei dikarenakan :

- Adanya pemetaan baik OPD maupun target Karakteristik ASN yang yang ditargetkan untuk mengisi kuesioner
- Hasil pemetaan ditindak lanjuti dengan perintah tertulis dari Pimpinan kepada pimpinan OPD untuk mengkoordinasikan pelaksanaan survei kepada ASN dilingkungan kerja masing-masing.
- Dimonitornya pelaksanaan survei

2. Evaluasi Organisasi

Dari 16 komponen yang harus dilaksanakan telah terlaksana lebih dari 50% atau sebanyak 10 komponen. Sedangkan sisanya pada dasarnya sudah terdapat beberapa komponen yang dilakukan namun hanya pada awal-awal ditetapkannya ketentuan BerAKHLAK (tidak dilakukan secara berkala dari tahun ke tahun)

B. Faktor Penghambat

1. Survei BerAKHLAK

Sampel ASN yang ditargetkan untuk mengisi koesioner survei tidak mencapai target minimal, yaitu ASN Non-JPT dengan pendidikan Diploma seharusnya mengisi koesioner sebanyak 74 orang namun hanya 15 orang (kurang 32 orang). Hal ini disebabkan ASN dengan pendidikan Diploma didominasi oleh Tenaga Kesehatan yang tempat tugasnya di desa-desa dan bahkan kepulauan dengan akses internet yang kurang optimal sehingga pengisian koesioner online lemot dan bahkan gagal terkirim

2. Evaluasi Organisasi

- Publikasi (Banner/Baliho/Videotron BerAKHLAK) belum dilakukan secara berkala
- Belum dilakukannya Publikasi konten BerAKHLAK pada akun media sosial instansi
- Belum dilakukannya Podcast implementasi BerAKHLAK
- Belum dilakukannya publikasi BerAKHLAK melalui media massa cetak/online



Upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan :

1. Pemetaan ASN yang harus mengisi survei mendatang lebih dikonsentrasikan kepada ASN yang bertugas di daratan dan memiliki akses internet yang cukup memadai (lancar).
2. Publikasi dilakukan secara berkala baik dalam bentuk fisik maupun melalui akun media sosial.
3. Membuat podcast implementasi BerAKHLAK agar mudah diakses melalui internet dan didengarkan kapan saja oleh ASN dan stakeholders.

b. IKM

Faktor Pendukung IKM :

1. Seluruh unit pelayanan publik telah memahami undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik khususnya terkait dengan standard pelayanan pada komponen persyaratan layanan
2. Seluruh unit pelayanan publik telah menetapkan biaya/tarif pada standard pelayanannya
3. Seluruh unit pelayanan publik telah menetapkan standard pelayanan terhadap produk layanan yang dimiliki
4. Sebagian besar Unit pelayanan publik telah memiliki pelaksana layanan yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan
5. Sebagian besar Unit pelayanan publik telah memiliki pelaksana layanan yang memiliki perilaku layanan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan
6. Sebagian besar Unit pelayanan publik telah memiliki pengelolaan pengaduan yang sesuai dengan standard pelayanannya

Faktor penghambat :

1. Masih kurangnya publikasi baik secara elektronik maupun non elektronik oleh unit pelayanan publik terkait dengan sistem, mekanisme dan prosedur layanan sehingga masih terdapat masyarakat/pengguna layanan yang belum mengetahui atau memahami system, mekanisme dan prosedur layanan.
2. Masih terdapat unit pelayanan publik yg dalam memberikan waktu penyelesaian layanan tidak sesuai standard pelayanan yang telah ditetapkan



3. Masih terdapat sebagian besar unit pelayanan publik yang masih kurang memiliki sarana prasarana ruang layanan yang memadai khususnya layanan bagi kelompok rentan/marjinal

14. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Hasil Tema Prioritas RB Tematik

Capaian Kinerja RB Tematik

15. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Indeks Infrastruktur

Faktor pendukung indeks infrastruktur antara lain adalah:

1. Indikator infrastruktur pendukung kesehatan terdiri dari 3 yaitu infrastruktur air limbah (95%), air minum (100%), dan drainase (100%).
2. Penyesuaian SK Ruas Jalan Kabupaten pada tahun 2024 sehingga ruas jalan Kabupaten berkurang dari 1500Km ke 850Km.

Adapun faktor penghambat antara lain adalah penyusunan regulasi terkait RDTR yang belum terselesaikan yang mengakibatkan capaian rasio dokumen tata ruang yang selesai dan disusun menjadi hanya separuh dari target 2 peraturan bupati RDTR.

16. Meningkatnya Penanganan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Faktor pendukung dalam indeks kualitas lingkungan hidup antara lain adalah :

1. Adanya ketaatan pelaku usaha dalam menyusun dan melaksanakan dokumen lingkungan hidup.
2. Adanya pemantauan kualitas air sungai dan udara yang dilakukan secara berkala.

Faktor penghambat dalam indeks kualitas lingkungan hidup antara lain adalah:

1. Tingginya aktivitas domestik dari masyarakat yang membuang limbahnya ke sungai.



2. Anomali cuaca kering yang berkepanjangan yang berakibat debit air sungai menurun.
3. Pengurangan luas kawasan hutan dikarenakan perubahan status lahan sebagai fasum dan fasos.
4. Adanya kebakaran hutan dan lahan tahun 2024 sebesar 310,57 Ha (Sumber data KLHK).



CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN KABUPATEN

❖ Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Urusan bidang Pertanian,

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.555.790.000,- dengan realisasi Rp. 39.178.450.000,- atau sebesar 97,33%.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2024

No	OPD Pelaksana	Nomor SP DIPA	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)			
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Sumenep	SP DIPA-018.08.4.05 9185/2024	018.08.4.059185	23 Kecamatan se Kab-Sumenep	40.254.140.000	38.876.800.000	96,58			
a.		Revisi 13 Tanggal 19-Nopember-2024	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Berkualitas					40.186.040.000	38.811.050.000	96,58
b.			Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian					15.000.000	14.750.000	98,33



c.			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP		53.100.000	51.000.000	96,05
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Sumenep	SP DIPA-018.04.4.05 91/2024	018.04.EC 5887				
		Revisi IV Tanggal 28 Feb.2024	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	KWT. Kasih Ibu Desa Bragung Kec. Guluk-Guluk	301.650.000	301.650.000	100
JUMLAH					40.555.790.000	39.178.450.000	97,33

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, 2024

❖ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.1.1 Dana Desa diperuntukkan untuk 27 Kecamatan / 330 Pemerintah Desa di Kabupaten Sumenep dimana mekanisme penyaluran dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke (Rekening Kas Desa). Instansi Pemberi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Anggaran : 363.197.008.000

Realisasi Penyaluran : 363.197.008.000 (100%)

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Anggaran (Penyaluran) Dana Desa Tahun 2024 masing masing desa dari RKUN ke RKD, sebagai berikut :

Nama Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Kecamatan Kota Sumenep			
Kolor	1.494.854.000	1.494.854.000	100%
Pabian	1.387.417.000	1.387.417.000	100%
Marengan Daya	955.696.000	955.696.000	100%
Kacongan	1.154.241.000	1.154.241.000	100%
Paberasan	1.413.907.000	1.413.907.000	100%
Parsanga	1.318.731.000	1.318.731.000	100%
Bangkal	883.385.000	883.385.000	100%
Kebunan	1.044.683.000	1.044.683.000	100%
Pamolokan	1.594.982.000	1.594.982.000	100%
Pangarangan	1.274.316.000	1.274.316.000	100%
Pandian	1.414.177.000	1.414.177.000	100%



Nama Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Kebunagung	1.317.693.000	1.317.693.000	100%
Kecamatan Kalianget			
Pinggirpapas	1.707.105.000	1.707.105.000	100%
Karanganyar	876.758.000	876.758.000	100%
Marengan Laok	1.143.351.000	1.143.351.000	100%
Kertasada	1.296.185.000	1.296.185.000	100%
Kalimook	1.329.198.000	1.329.198.000	100%
Kalianget Barat	1.576.548.000	1.576.548.000	100%
Kalianget Timur	1.689.037.000	1.689.037.000	100%
Kecamatan Manding			
Kasengan	1.078.591.000	1.078.591.000	100%
Lalangan	882.890.000	882.890.000	100%
Tenonan	1.058.720.000	1.058.720.000	100%
Lanjuk	905.273.000	905.273.000	100%
Gadding	1.109.729.000	1.109.729.000	100%
Giring	1.188.953.000	1.188.953.000	100%
Gunung Kembar	884.412.000	884.412.000	100%
Jaba'an	810.239.000	810.239.000	100%
Manding Laok	933.353.000	933.353.000	100%
Manding Timur	882.333.000	882.333.000	100%
Manding Daya	990.405.000	990.405.000	100%
Kecamatan Talango			
Talango	1.495.082.000	1.495.082.000	100%
Padike	1.060.484.000	1.060.484.000	100%
Cabbiya	900.579.000	900.579.000	100%
Essang	1.111.860.000	1.111.860.000	100%
Kombang	933.467.000	933.467.000	100%
Poteran	954.849.000	954.849.000	100%
Palasa	1.694.788.000	1.694.788.000	100%
Gapurana	1.252.147.000	1.252.147.000	100%
Kecamatan Bluto			
Guluk Manjung	1.064.596.000	1.064.596.000	100%
Kapedi	1.632.249.000	1.632.249.000	100%
Pakandangan Barat	1.210.167.000	1.210.167.000	100%
Pakandangan Tengah	1.077.608.000	1.077.608.000	100%
Pakandangan Sangra	811.458.000	811.458.000	100%
Aeng Dake	1.250.652.000	1.250.652.000	100%
Aeng Baja Kenek	966.938.000	966.938.000	100%
Bluto	723.715.000	723.715.000	100%
Lobuk	1.428.938.000	1.428.938.000	100%
Bumbungan	795.967.000	795.967.000	100%
Masaran	953.519.000	953.519.000	100%
Palongan	1.056.819.000	1.056.819.000	100%
Aeng Baja Raja	767.328.000	767.328.000	100%
Karang Campaka	698.619.000	698.619.000	100%
Sera Barat	802.301.000	802.301.000	100%
Sera Tengah	656.798.000	656.798.000	100%
Sera Timur	818.684.000	818.684.000	100%
Gingging	778.354.000	778.354.000	100%
Errabu	678.411.000	678.411.000	100%
Gilang	930.477.000	930.477.000	100%



Nama Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Kecamatan Saronggi			
Pagar Batu	1.399.301.000	1.399.301.000	100%
Tanjung	1.247.965.000	1.247.965.000	100%
Kebundadap Timur	937.023.000	937.023.000	100%
Langsar	995.023.000	995.023.000	100%
Kebundadap Barat	834.054.000	834.054.000	100%
Saroka	1.084.074.000	1.084.074.000	100%
Tanamerah	1.029.176.000	1.029.176.000	100%
Nambakor	802.619.000	802.619.000	100%
Saronggi	837.558.000	837.558.000	100%
Moangan	934.614.000	934.614.000	100%
Juluk	1.043.821.000	1.043.821.000	100%
Aengtongtong	746.996.000	746.996.000	100%
Talang	1.591.386.000	1.591.386.000	100%
Kambingan Timur	787.477.000	787.477.000	100%
Kecamatan Lenteng			
Moncek Barat	758.774.000	758.774.000	100%
Moncek Tengah	878.865.000	878.865.000	100%
Moncek Timur	852.810.000	852.810.000	100%
Banaresep Timur	1.305.547.000	1.305.547.000	100%
Tarogan	681.757.000	681.757.000	100%
Kambingan Barat	787.237.000	787.237.000	100%
Poreh	1.050.649.000	1.050.649.000	100%
Lenteng Timur	1.578.207.000	1.578.207.000	100%
Lembung Timur	1.050.553.000	1.050.553.000	100%
Lenteng Barat	2.234.845.000	2.234.845.000	100%
Banaresep Barat	843.186.000	843.186.000	100%
Billapora Rebba	1.377.141.000	1.377.141.000	100%
Lembung Barat	1.004.611.000	1.004.611.000	100%
Ellak Laok	999.257.000	999.257.000	100%
Ellak Daya	1.280.983.000	1.280.983.000	100%
Daramista	1.057.187.000	1.057.187.000	100%
Jambu	651.862.000	651.862.000	100%
Cangkreng	802.759.000	802.759.000	100%
Meddelan	1.016.637.000	1.016.637.000	100%
Sendir	717.655.000	717.655.000	100%
Kecamatan Giligenting			
Galis	1.014.278.000	1.014.278.000	100%
Gedugan	1.099.476.000	1.099.476.000	100%
Bringsang	903.229.000	903.229.000	100%
Aenganyar	1.058.140.000	1.058.140.000	100%
Lombang	1.038.091.000	1.038.091.000	100%
Jate	940.590.000	940.590.000	100%
Banbaru	1.007.631.000	1.007.631.000	100%
Banmaleng	1.232.394.000	1.232.394.000	100%
Kecamatan Guluk-Guluk			
Bakeong	1.569.847.000	1.569.847.000	100%
Payudan Dundang	964.734.000	964.734.000	100%
Pordapor	1.205.045.000	1.205.045.000	100%
Guluk-Guluk	2.612.028.000	2.612.028.000	100%
Ketawang Laok	891.048.000	891.048.000	100%
Pananggungan	747.504.000	747.504.000	100%
Bragung	1.843.776.000	1.843.776.000	100%



Nama Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Tambuko	981.268.000	981.268.000	100%
Payudan Nangger	895.160.000	895.160.000	100%
Payudan Daleman	935.218.000	935.218.000	100%
Payudan Karangsokon	1.171.794.000	1.171.794.000	100%
Batuampar	1.270.753.000	1.270.753.000	100%
Kecamatan Ganding			
Bataal Barat	766.575.000	766.575.000	100%
Bataal Timur	754.441.000	754.441.000	100%
Rombiya Barat	751.165.000	751.165.000	100%
Rombiya Timur	969.511.000	969.511.000	100%
Talaga	1.129.271.000	1.129.271.000	100%
Billapora Barat	780.868.000	780.868.000	100%
Billapora Timur	781.395.000	781.395.000	100%
Ganding	1.071.840.000	1.071.840.000	100%
Gadu Timur	986.715.000	986.715.000	100%
Gadu Barat	1.342.977.000	1.342.977.000	100%
Ketawang Larangan	1.264.295.000	1.264.295.000	100%
Ketawang Parebaan	1.005.730.000	1.005.730.000	100%
Ketawang Daleman	816.750.000	816.750.000	100%
Ketawang Karay	1.356.567.000	1.356.567.000	100%
Kecamatan Pragaan			
Kaduara Timur	1.205.610.000	1.205.610.000	100%
Sendang	806.299.000	806.299.000	100%
Rombasan	745.778.000	745.778.000	100%
Sentol Laok	836.775.000	836.775.000	100%
Larangan Perreng	1.459.436.000	1.459.436.000	100%
Sentol Daya	1.336.412.000	1.336.412.000	100%
Pakamban Daya	1.114.582.000	1.114.582.000	100%
Pakamban Laok	1.163.336.000	1.163.336.000	100%
Jaddung	1.683.763.000	1.683.763.000	100%
Pragaan Laok	1.647.173.000	1.647.173.000	100%
Pragaan Daya	2.328.210.000	2.328.210.000	100%
Prenduan	2.106.062.000	2.106.062.000	100%
Aeng Panas	1.109.134.000	1.109.134.000	100%
Karduluk	2.902.206.000	2.902.206.000	100%
Kecamatan Ambunten			
Ambunten Barat	1.004.941.000	1.004.941.000	100%
Ambunten Tengah	1.749.642.000	1.749.642.000	100%
Ambunten Timur	1.070.464.000	1.070.464.000	100%
Tambaagung Barat	919.499.000	919.499.000	100%
Tambaagung Tengah	1.178.184.000	1.178.184.000	100%
Tambaagung Ares	1.035.523.000	1.035.523.000	100%
Sogian	980.452.000	980.452.000	100%
Tambaagung Timur	922.188.000	922.188.000	100%
Bukabu	843.940.000	843.940.000	100%
Campor Barat	811.283.000	811.283.000	100%
Keles	796.861.000	796.861.000	100%
Campor Timur	743.964.000	743.964.000	100%
Belluk Ares	737.437.000	737.437.000	100%
Belluk Kenek	882.650.000	882.650.000	100%
Belluk Raja	936.884.000	936.884.000	100%
Kecamatan Pasongsongan			



Nama Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Montorna	1.701.605.000	1.701.605.000	100%
Prancak	1.255.262.000	1.255.262.000	100%
Campaka	1.742.882.000	1.742.882.000	100%
Rajun	955.017.000	955.017.000	100%
Lebeng Timur	1.063.536.000	1.063.536.000	100%
Lebeng Barat	1.212.235.000	1.212.235.000	100%
Soddara	1.202.939.000	1.202.939.000	100%
Pasongsongan	1.913.290.000	1.913.290.000	100%
Padangdangan	994.820.000	994.820.000	100%
Panaongan	1.182.050.000	1.182.050.000	100%
Kecamatan Dasuk			
Slopeng	806.490.000	806.490.000	100%
Semaan	834.815.000	834.815.000	100%
Batubellah Barat	951.602.000	951.602.000	100%
Batubellah Timur	1.017.421.000	1.017.421.000	100%
Kecer	871.518.000	871.518.000	100%
Bates	884.307.000	884.307.000	100%
Bringin	1.304.625.000	1.304.625.000	100%
Jelbudan	990.160.000	990.160.000	100%
Kerta Barat	761.943.000	761.943.000	100%
Kerta Timur	907.232.000	907.232.000	100%
Nyapar	1.123.119.000	1.123.119.000	100%
Dasuk Barat	914.882.000	914.882.000	100%
Dasuk Timur	695.915.000	695.915.000	100%
Dasuk Laok	989.646.000	989.646.000	100%
Mantajun	1.131.273.000	1.131.273.000	100%
Kecamatan Rubaru			
Mandala	1.260.667.000	1.260.667.000	100%
Pakondang	1.174.124.000	1.174.124.000	100%
Matanair	1.221.089.000	1.221.089.000	100%
Tambaksari	869.894.000	869.894.000	100%
Banasare	947.246.000	947.246.000	100%
Bunbarat	1.029.877.000	1.029.877.000	100%
Karang Nangka	1.096.530.000	1.096.530.000	100%
Basoka	1.256.316.000	1.256.316.000	100%
Duko	1.412.529.000	1.412.529.000	100%
Rubaru	1.310.480.000	1.310.480.000	100%
Kalebengan	1.121.836.000	1.121.836.000	100%
Kecamatan Batang-Batang			
Kolpo	1.283.886.000	1.283.886.000	100%
Tamidung	1.099.678.000	1.099.678.000	100%
Batang-Batang Laok	1.224.721.000	1.224.721.000	100%
Batang-Batang Daya	1.273.814.000	1.273.814.000	100%
Totosan	1.091.460.000	1.091.460.000	100%
Banuaju Barat	805.159.000	805.159.000	100%
Banuaju Timur	811.441.000	811.441.000	100%
Jenangger	1.018.445.000	1.018.445.000	100%
Nyabakan Timur	1.262.271.000	1.262.271.000	100%
Nyabakan Barat	1.591.440.000	1.591.440.000	100%
Jangkong	906.182.000	906.182.000	100%
Legung Barat	1.038.703.000	1.038.703.000	100%
Legung Timur	1.297.923.000	1.297.923.000	100%
Dapenda	1.266.764.000	1.266.764.000	100%



Nama Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Bilangan	708.173.000	708.173.000	100%
Lombang	865.908.000	865.908.000	100%
Kecamatan Batuputih			
Aengmerah	1.350.754.000	1.350.754.000	100%
Tengedan	783.341.000	783.341.000	100%
Juruan Laok	1.295.280.000	1.295.280.000	100%
Juruan Daya	1.113.068.000	1.113.068.000	100%
Badur	794.380.000	794.380.000	100%
Gedang-Gedang	1.008.125.000	1.008.125.000	100%
Batuputih Kenek	1.239.946.000	1.239.946.000	100%
Batuputih Laok	1.311.643.000	1.311.643.000	100%
Batuputih Daya	1.083.282.000	1.083.282.000	100%
Bantelan	1.026.368.000	1.026.368.000	100%
Larangan Barma	985.087.000	985.087.000	100%
Larangan Kerta	788.489.000	788.489.000	100%
Bulla'an	1.464.162.000	1.464.162.000	100%
Sergang	795.850.000	795.850.000	100%
Kecamatan Dungkek			
Candi	817.017.000	817.017.000	100%
Jadung	951.486.000	951.486.000	100%
Romben Barat	793.529.000	793.529.000	100%
Romben Rana	762.107.000	762.107.000	100%
Romben Guna	963.789.000	963.789.000	100%
Taman Sare	872.142.000	872.142.000	100%
Bicabbi	1.154.211.000	1.154.211.000	100%
Dungkek	1.311.378.000	1.311.378.000	100%
Bunpenang	956.101.000	956.101.000	100%
Bungin-Bungin	621.581.000	621.581.000	100%
Lapa Taman	840.682.000	840.682.000	100%
Lapa Laok	786.643.000	786.643.000	100%
Lapa Daya	696.318.000	696.318.000	100%
Bancamara	873.855.000	873.855.000	100%
Banra'as	1.023.446.000	1.023.446.000	100%
Kecamatan Gapura			
Grujugan	1.408.633.000	1.408.633.000	100%
Longos	1.425.258.000	1.425.258.000	100%
Andulang	1.475.280.000	1.475.280.000	100%
Gapura Timur	1.124.460.000	1.124.460.000	100%
Mandala	690.876.000	690.876.000	100%
Gersik Putih	959.920.000	959.920.000	100%
Gapura Tengah	859.165.000	859.165.000	100%
Gapura Barat	1.204.935.000	1.204.935.000	100%
Panagan	991.306.000	991.306.000	100%
Palo'lo'an	896.919.000	896.919.000	100%
Banjar Timur	690.362.000	690.362.000	100%
Banjar Barat	1.131.000.000	1.131.000.000	100%
Batudinding	1.017.125.000	1.017.125.000	100%
Baban	873.776.000	873.776.000	100%
Karangbudi	1.084.676.000	1.084.676.000	100%
Braji	783.011.000	783.011.000	100%
Poja	888.792.000	888.792.000	100%
Kecamatan Gayam			



Nama Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Pancor	1.304.336.000	1.304.336.000	100%
Prambanan	1.305.336.000	1.305.336.000	100%
Gendang Timur	1.114.578.000	1.114.578.000	100%
Karang Tengah	979.181.000	979.181.000	100%
Jambuir	925.147.000	925.147.000	100%
Gayam	1.347.559.000	1.347.559.000	100%
Kalawang	994.150.000	994.150.000	100%
Nyamplong	865.054.000	865.054.000	100%
Gendang Barat	1.063.694.000	1.063.694.000	100%
Tarebung	933.124.000	933.124.000	100%
Kecamatan Nonggunong			
Nonggunong	820.601.000	820.601.000	100%
Somber	759.196.000	759.196.000	100%
Tanah Merah	783.558.000	783.558.000	100%
Sokarame Timur	887.738.000	887.738.000	100%
Sokarame Paseser	1.227.223.000	1.227.223.000	100%
Talaga	838.151.000	838.151.000	100%
Rosong	752.816.000	752.816.000	100%
Sonok	1.146.276.000	1.146.276.000	100%
Kecamatan Ra'as			
Ketupat	1.115.693.000	1.115.693.000	100%
Jungkat	746.334.000	746.334.000	100%
Kropoh	1.117.205.000	1.117.205.000	100%
Karangangka	960.922.000	960.922.000	100%
Alas Malang	869.681.000	869.681.000	100%
Poteran	829.544.000	829.544.000	100%
Brakas	1.592.610.000	1.592.610.000	100%
Tonduk	1.495.170.000	1.495.170.000	100%
Guwa-Guwa	1.132.953.000	1.132.953.000	100%
Kecamatan Masalembu			
Sukajeruk	983.112.000	983.112.000	100%
Masalima	1.661.072.000	1.661.072.000	100%
Masakaming	866.572.000	866.572.000	100%
Kramian	1.548.792.000	1.548.792.000	100%
Kecamatan Arjasa			
Pajanangger	1.140.236.000	1.140.236.000	100%
Sawah Sumur	1.283.060.000	1.283.060.000	100%
Paseraman	1.224.265.000	1.224.265.000	100%
Gelaman	1.793.586.000	1.793.586.000	100%
Buddi	1.111.932.000	1.111.932.000	100%
Kolo-Kolo	1.214.530.000	1.214.530.000	100%
Angkatan	1.071.259.000	1.071.259.000	100%
Kalisangka	911.532.000	911.532.000	100%
Bilis-Bilis	858.120.000	858.120.000	100%
Laok Jang-Jang	1.023.724.000	1.023.724.000	100%
Sumberangka	890.099.000	890.099.000	100%
Duko	995.332.000	995.332.000	100%
Kalikatak	906.337.000	906.337.000	100%
Arjasa	1.027.135.000	1.027.135.000	100%
Kalinganyar	813.018.000	813.018.000	100%
Angon-Angon	1.113.280.000	1.113.280.000	100%
Sambakati	1.095.565.000	1.095.565.000	100%



Nama Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Pandeman	1.026.717.000	1.026.717.000	100%
Pabean	699.887.000	699.887.000	100%
Kecamatan Sapeken			
Sepanjang	2.163.346.000	2.163.346.000	100%
Tanjung Kiaok	1.984.954.000	1.984.954.000	100%
Sakala	960.692.000	960.692.000	100%
Pagerungan Besar	1.827.593.000	1.827.593.000	100%
Pagerungan Kecil	2.169.594.000	2.169.594.000	100%
Saseel	1.432.219.000	1.432.219.000	100%
Sapeken	2.086.610.000	2.086.610.000	100%
Sabunten	1.378.061.000	1.378.061.000	100%
Paliat	1.198.568.000	1.198.568.000	100%
Sadulang	1.211.194.000	1.211.194.000	100%
Saur Saebus	1.388.447.000	1.388.447.000	100%
Kecamatan Batuan			
Patean	934.349.000	934.349.000	100%
Babbalan	1.251.301.000	1.251.301.000	100%
Gedungan	1.048.457.000	1.048.457.000	100%
Gunggung	1.007.799.000	1.007.799.000	100%
Batuan	1.270.485.000	1.270.485.000	100%
Torbang	854.329.000	854.329.000	100%
Galugur	967.075.000	967.075.000	100%
Kecamatan Kangayan			
Saobi	1.138.272.000	1.138.272.000	100%
Kangayan	1.483.416.000	1.483.416.000	100%
Torjek	1.221.227.000	1.221.227.000	100%
Cangkramaan	854.809.000	854.809.000	100%
Tembayangan	797.777.000	797.777.000	100%
Batuputih	942.798.000	942.798.000	100%
Daandung	1.156.588.000	1.156.588.000	100%
Timur Jang-Jang	1.139.648.000	1.139.648.000	100%
Jukong-Jukong	1.011.297.000	1.011.297.000	100%
Jumlah	363.197.008.000	363.197.008.000	100%

3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN

❖ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 28 Pebruari 2024 Nomor 400.10.5/1759/112.3/2024 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur, tentang Penetapan Pagu Indikatif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.an, yaitu : Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Program Pemberdayaan Bumdesa, dan



Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, dengan anggaran sebesar Rp. 961.250.000 realisasi 100%, dengan rincian sebagai berikut :

3.2.1. Pemberdayaan Bumdesa, anggaran sebesar Rp. 400.000.000

Lokasi :

- 1) Desa Bringsang Kec. Giligenting sebesar Rp. 100.000.000
Jenis Usaha : Perdagangan
- 2) Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng sebesar Rp. 100.000.000
Jenis Usaha : Perdagangan
- 3) Desa Pagerungan Kecil Kec. Sapeken Rp. 100.000.000
Jenis Usaha : Perdagangan
- 4) Desa Kacongan Kec. Kota Sumenep sebesar Rp. 100.000.000
Jenis Usaha : Perdagangan

3.2.2. Desa Berdaya, anggaran sebesar Rp. 300.000.000

Lokasi :

- 1) Desa Kolor Kec. Kota Sumenep sebesar Rp. 100.000.000
Jenis Usaha : Mini Cafe
- 2) Desa Paberasan Kec. Kota Sumenep sebesar Rp. 100.000.000
Jenis Usaha : Alat Selep Padi
- 3) Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep sebesar Rp. 100.000.000
Jenis Usaha : Mini Cafe

3.2.3. Jatim Puspa kepada 2 (dua) Pemerintah Desa (90 KPM) sebesar Rp. 261.250.000. Masing masing KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2.500.000 yang diwujudkan dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

- 1). Desa Karangbudi Kecamatan Gapura sebanyak 45 KPM
Bantuan / Kegiatan : Rp. 112.500.000
BOP Desa : Rp. 12.500.000
HR Pendamping Desa : Rp. 5.625.000
- 2). Desa Tambaagung Tengah Kec. Ambunten sebanyak 45 KPM
Bantuan / Kegiatan : Rp. 112.500.000
BOP Desa : Rp. 12.500.000
HR Pendamping Desa : Rp. 5.625.000

❖ Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Urusan bidang Pertanian,

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran



sebesar Rp. 87.080.000,- dengan realisasi Rp. 86.350.000,- atau sebesar 99,16%

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Alokasi dan realisasi anggaran Tugas Pembantuan Urusan Pertanian Tahun 2024

No	OPD Pelaksana	Nomor SP DIPA	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Sumenep	SP DIPA-125.01.3.690703/2024	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Berkualitas	Kabupaten Sumenep	87.080.000	86.350.000	99,16
			Penyusunan Prognosa Neraca Pangan	Kabupaten Sumenep	12.070.000	11.690.000	96,85
			Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP)	Kabupaten Sumenep	41.850.000	41.590.000	99,38
			Penguatan Cadangan Pangan (CPP)	Kabupaten Sumenep	9.660.000	9.590.000	99,28
			Fasilitas Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Kabupaten Sumenep	23.500.000	23.480.000	99,91
TOTAL					87.080.000	86.350.000	99,16

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, 2024

Permasalahan :

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian pada Tahun 2024, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi yaitu adanya perubahan regulasi yang



membutuhkan penyesuaian secara cepat dan tepat pada pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.

Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya antara lain penyesuaian persyaratan teknis yang harus diterapkan, percepatan penyelesaian fisik di lapangan dan percepatan penyelesaian administrasi kegiatan



PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Urusan Desentralisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2024, menetapkan bahwa pengelolaan kegiatan pembangunan pendidikan yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, yaitu

- (a) Meningkatnya akses pendidikan, dengan program; peningkatan akses PAUD, peningkatan akses SD, peningkatan akses SMP, peningkatan akses PNF, dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan,
- (b) Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan program peningkatan kualitas PAUD, peningkatan kualitas SD, peningkatan kualitas SMP, peningkatan kualitas PNF, dan kualifikasi akademik PTK,
- (c) peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF, SD dan SMP,
- (d) Meningkatnya sarana layanan perkantoran, dengan program peningkatan manajemen dan pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Disamping itu ada beberapa prioritas kegiatan urusan wajib yang sudah ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten Sumenep untuk dilaksanakan yang tercantum dalam tahun anggaran 2024.



4.1.2 Target pencapaian SPM oleh Daerah

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN	KETERANGAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Tingkat partisipasi warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 %	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	Setiap Tahun
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	
2.	PENDIDIKAN DASAR	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Setiap Tahun
				Jumlah anak usia 7-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	
3.	PENDIDIKAN KESETARAAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Setiap Tahun
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	



4.1.3 Realisasi

Realisasi pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET CAPAIAN	REALISASI	KETERANGAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Tingkat partisipasi warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 %	68.31 %	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	Setiap Tahun
					Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	
2	PENDIDIKAN DASAR	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	105%	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Setiap Tahun
					Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	
3	PENDIDIKAN KESETARAAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	4.33 %	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Setiap Tahun
					Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	



4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran belanja dan realisasi kegiatan tersebut sebagai berikut :

No	Kegiatan	Alokasi dana	Capaian/Realisasi
1	Pendapatan	50.000.000,00	38.570.000,00
2	Belanja Tidak Langsung	751.937.022,00	644.446.285.749,00
3	Belanja Langsung	50.939.832.691,00	49.664.111.504,00

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	SMP	2
3	SMA	33
4	D	3
5	S1	24
6	S2	18
7	S3	1
JUMLAH		85

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Untuk bidang Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;



2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang-orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)



4.2.2 Target Pencapaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

NO	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	REALISASI		
				Penyebut	Pembilang	Nilai (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Dinas Kesehatan	17.980	14.224	79,11
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	17.876	13.506	75,55
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Dinas Kesehatan	16.915	13.073	77,29
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	63.765	57.763	90,59
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	122.972	118.178	96,10



NO	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	REALISASI		
				Penyebut	Pembilang	Nilai (%)
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	736.118	684.945	93,05
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	Dinas Kesehatan	184.276	184.276	100,00
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	296.719	258.843	87,24
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita diabetes mellitus usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	11.760	11.215	95,37
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	2.101	1.989	94,67
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	Dinas Kesehatan	16.462	16.462	100,00
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan	20.708	20.708	100,00



4.2.3 Alokasi Anggaran dan Program Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.284.300.000
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	264.014.000
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	109.405.935
4	Pelayanan kesehatan Balita	1.649.665.000
5	Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.150.201.600
6	Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	1.649.665.000
7	Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	14.220.800
8	Pelayanan kesehatan pada Penderita Hipertensi	77.472.000
9	Pelayanan kesehatan pada Penderita DM	858.127.225
10	Pelayanan kesehatan ODGJ Berat	73.845.800
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	285.098.000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV	22.490.000
TOTAL		7.438.505.360

4.2.4 Dukungan Personil

No	PELAYANAN	INDIKATOR	JUMLAH
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.764.110 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1.182 Tenaga kes
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	55.120 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1.182 Tenaga kesehatan
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	90.495 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	6.987 Tenaga kesehatan
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	636.952 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	6.927 Tenaga kesehatan



No	PELAYANAN	INDIKATOR	JUMLAH
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	390.340 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	2.322 Tenaga kesehatan
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.447.586 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2.812 Tenaga kesehatan
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	190.552 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3.184 Tenaga kesehatan
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	296.839 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.242 Tenaga kesehatan
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	23.905 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.213 Tenaga kesehatan
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	134 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	128 Tenaga kesehatan
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	379.764 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	301 Tenaga kesehatan
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	62.130 paket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	180 Tenaga kesehatan



4.2.5 Permasalahan dan Solusi

A. Pelayanan kesehatan ibu hamil;

PERMASALAHAN

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 79,11%. Permasalahan tersebut dikarenakan penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi berdasarkan KMK Nomor HK.01.07/Menkes/140/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/Menkes/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021 – 2025. Ada penambahan sasaran proyeksi sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3.876 ibu hamil di Kabupaten Sumenep pada tahun 2024.

Ada beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelayanan kesehatan ibu hamil, antara lain :

1. Ibu hamil masih adayang tidak memeriksakan kehamilannya pada usia kehamilan trimester 1 karena :
 - a) Partisipasi keluarga tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan masih belum optimal
 - b) Faktor budaya setempat yakni tidak periksa ke tenaga kesehatan jika perut belum besar
 - c) Kurangnya peran serta lintas sektor dalam memberikan promosi kesehatan khususnya tentang pemeriksaan antenatal rutin ke tenaga kesehatan dan mendorong ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil.
2. Mobilitas masyarakat Kabupaten Sumenep yang sangat tinggi. Banyak ibu hamil pada awal kehamilan ikut merantau keluarganya keluar kota. Ibu hamil baru akan pulang ke kampung halamannya (Kabupaten Sumenep) pada saat mendekati tanggal perkiraan persalinan.



SOLUSI :

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meingkatkan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan antenatal
 - a) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan antenatal telah dilaksanakan antenatal care terpadu (ANCT) dengan program terkait. (gizi, imunisasi, penyakit menular, penyakit tidak menular). Melalui pelayanan antenatal care terpadu diharapkan ibu hamil mendapatkan pelayanan perlindungan secara menyeluruh baik mengenai kehamilan dan komplikasi kehamilan serta intervensi lain yang perlu diberikan selama proses kehamilan untuk kesehatan dan keselamatan ibu dan bayinya.
 - b) Persiapan kehamilan dipersiapkan sejak masa sebelum hamil yaitu masa calon pengantin. Advokasi dan orientasi dilakukan kepada penyuluh pernikahan untuk menyampaikan muatan kesehatan yang salah satunya tentang kehamilan yang sehat.
 - c) Penguatan Pemanfaatan buku KIA di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Peningkatan akses pelayanan antenatal
 - a) Pemberdayaan keluarga melalui optimalisasi kelas ibu hamil. Adanya kebijakan bahwa seluruh ibu hamil wajib mengikuti kelas ibu hamil. Namun yang perlu ditingkatkan adalah kualitas konseling dalam memotivasi ibu hamil untuk ikut kelas ibu hamil.
 - b) Pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi P4K. Namun pelaksanaan kegiatan P4K belum berjalan optimal dari segi kualitas, masih ada beberapa indikator pelaksanaan kegiatan P4K yang belum dilaksanakan. Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan P4K adalah kurangnya komitmen antara tenaga kesehatan, keluarga dan aparat desa serta kurangnya pemberdayaan masyarakat.



B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

PERMASALAHAN :

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 75,55%. Permasalahan tersebut dikarenakan Hal ini dikarenakan penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun Ada penambahan sasaran proyeksi sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4.413 ibu bersalin di Kabupaten Sumenep pada Tahun 2024.

SOLUSI :

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan peningkatan sarana serta prasarana fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas sebagai dasar pendukung terpenuhinya syarat minimal fasilitas kesehatan yang direkomendasikan untuk melakukan pertolongan persalinan.

C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;

PERMASALAHAN :

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 77,29%. Permasalahan tersebut dikarenakan Hal ini dikarenakan penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi berdasarkan KMK Nomor HK.01.07/Menkes/140/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/Menkes/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021 – 2025. Ada penambahan sasaran proyeksi bayi baru lahir sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4.093 bayi baru lahir di Kabupaten Sumenep pada tahun 2024.

SOLUSI :

- a. Meningkatkan kualitas pembinaan secara rutin kepada bidan desa dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- b. Penguatan skrining bayi baru lahir
- c. Penguatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)
- d. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan logistic



D. Pelayanan Kesehatan Balita :

PERMASALAHAN

Pencapaian Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 untuk Laki – Laki sebanyak 29. 514 orang (91 %), sedangkan untuk jumlah Perempuan sebanyak 28. 249 orang (90 %), Total Pencapaian Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita tahun 2024 adalah 57. 763 (90, 59 %). Pencapaian Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita pada tahun 2024 tidak mencapai target 100 %.

Permasalahan :

- a. Sasaran Proyeksi Tahun 2024 Terlalu Tinggi
- b. Mobilitas yang tinggi, balita ikut orangtua merantau ke luar kota
- c. Tingkat Kehadiran Balita diposyandu kurang

SOLUSI :

- a. Pembinaan ke petugas puskesmas tentang definisi operasional pelayanan kesehatan balita
- b. Penguatan MTBS dan SDIDTK
- c. Penguatan peran serta kader dan linsek dalam memotivasi sasaran untuk hadir ke posyandu
- d. Optimalisasi peran nakes dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah sasaran.

E. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

PERMASALAHAN

Untuk capaian pada usia Pendidikan dasar capaian tidak mencapai 100% dikarenakan sasaran menggunakan sasaran proyeksi sehingga capaian tidak mencapai 100%. Sehingga untuk capaian kabupaten menggunakan capaian data real siswa yang diskriminasi dan siswa yang dilakukan pemeriksaan secara berkala.



SOLUSI

Untuk capaian lebih baik menggunakan data real sesuai dengan data dilapangan, sehingga capaian kabupaten bisa 100%.

F. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

PERMASALAHAN :

- Pelaporan hasil skrining dan data ke aplikasi masih lambat.
- Skrining dilakukan ditempat tertentu sehingga peserta skrining tetap dan tidak berubah.

SOLUSI :

- Mengingatkan para Penanggung Jawab program di semua Puskesmas untuk melaporkan dengan batas waktu tertentu.
- Skrining dilakukan secara global.

G. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Untuk capaian usia lanjut telah mencapai 100%. Keberhasilan ini terjadi karena program ILP (Integrasi Layanan Primer) di semua Posyandu, jika tidak hadir ke posyandu dilakukan kunjungan rumah. Untuk tahun 2025 data lansia menggunakan data real agar capaian kabupaten bisa mencapai 100%.

H. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

PERMASALAHAN :

Beberapa faktor yang menyebabkan capaian Pelayanan kesehatan penderita hipertensi antara lain yaitu Kesadaran Masyarakat tentang Penyakit Tidak Menular termasuk Hipertensi, Keterbatasan Tenaga Kesehatan Terlatih dan kurangnya Kolaborasi antar sector Untuk mencapai target SPM,

SOLUSI :

- a. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pencegahan dan pengelolaan PTM kepada masyarakat, termasuk melalui media sosial dan kampanye kesehatan.



- b. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga medis dalam deteksi dini dan pengelolaan PTM melalui pelatihan yang berkelanjutan.
- c. Mengintegrasikan program promotif dan preventif terkait gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti penyuluhan pola makan sehat, olahraga rutin, dan berhenti merokok.
- d. Mendorong kolaborasi antar sektor terkait dalam pencegahan dan penanggulangan PTM agar dapat menciptakan kebijakan yang lebih terpadu dan efektif.

I. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;

PERMASALAHAN :

Beberapa faktor yang menyebabkan capaian Pelayanan kesehatan penderita hipertensi antara lain yaitu Kesadaran Masyarakat tentang Penyakit Tidak Menular termasuk Hipertensi, Keterbatasan Tenaga Kesehatan Terlatih dan kurangnya Kolaborasi antar sektor.

SOLUSI :

- a. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pencegahan dan pengelolaan PTM kepada masyarakat, termasuk melalui media sosial dan kampanye kesehatan.
- b. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga medis dalam deteksi dini dan pengelolaan PTM melalui pelatihan yang berkelanjutan.
- c. Mengintegrasikan program promotif dan preventif terkait gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti penyuluhan pola makan sehat, olahraga rutin, dan berhenti merokok
- d. Mendorong kolaborasi antar sektor terkait dalam pencegahan dan penanggulangan PTM agar dapat menciptakan kebijakan yang lebih terpadu dan efektif.

J. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat;

PERMASALAHAN

- Masih terdapat pasien ODGJ yang tidak teratur minum obat karena keluarga tidak mendukung.
- Pelaporan hasil skrining dan data ke aplikasi masih lambat.



SOLUSI

- Nakes berkunjung ke rumah pasien ODGJ dan memberikan pengertian serta motivasi kepada keluarga dengan didampingi oleh aparat akan pentingnya minum obat bagi pasien ODGJ.
- Mengingatkan para Penanggung Jawab program di semua Puskesmas untuk melaporkan dengan batas waktu tertentu.

K. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis;**PERMASALAHAN :**

Penemuan (Treatment Coverage) Kasus TBC di Kabupaten Sumenep Tiga Tahun Terakhir menunjukkan fluktuatif. Jumlah kasus TBC di tahun 2022 jumlah kasus TBC yang ditemukan dan diobati sebanyak 2.175 jiwa 85,20%, tahun 2023 di temukan sebanyak 2.546 jiwa 100%, pada tahun 2024 di temukan sebanyak 2.545 jiwa 85,88% penderita anak yang di temukan dan di obati 112 anak, Keberhasilan Pengobatan tahun 2024 sebesar 90%. Dengan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis yang di layani secara standart sudah tercapai 100% sejumlah 16.462 terduga.

SOLUSI

Diperlukan Kerjasama Lintas program dan Lintas sektor untuk meningkatkan capaian indikator program serta monitoring dan evaluasi berkala sehingga pelaksanaan strategi program dapat berjalan sesuai Harapan

L. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia / Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Orang berisiko terinfeksi HIV yang sudah mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Kabupaten Sumenep tahun 2024 tercapai 100%. Capaian ini telah memenuhi target karena ada beberapa faktor pendukung yaitu Pengisian pencatatan dan pelaporan dalam e-kohort Ibu hamil lengkap dengan pemeriksaan HIV., Terdapat perbedaan pencatatan Skrining HIV pada pasien populasi kunci dengan SIHA 2.1, Perlu adanya penjangkauan khususnya pada populasi kunci (WPS,Waria, Penasun, WBP dan LSL).

Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan orang orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia



/ Human Immunodeficiency Virus (HIV). yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventi yaitu :

- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan *Mobile Voluntary Counseling and Testing (VCT)* dengan memenuhi protokol kesehatan.
- Penguatan regulasi yang mendukung program nasional terutama TB dan HIV kepada fasilitas kesehatan swasta.
- Membuat format manual sebagai form validasi terhadap data yang di input pada aplikasi SIHA
- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis - Kolaborasi lintas program dengan membentuk tim khusus TB-HIV

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Pekerjaan Umum Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

b. Target dan realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4800	4800	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	JARINGAN PERPIPAAN						
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	4800	4800	0	100.00 %	
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	4800	4800	0	100.00 %	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN						



	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1142210	1142210	0	100.00 %	
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1142210	1142210	0	100.00 %	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4908	4908	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	4908	4908	0	100.00 %	



	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	49	49	0	100.00 %	
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	49	49	0	100.00 %	



c. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Alokasi Dana
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Rp. 12,935,057,343.00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 12,935,057,343.00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Rp. 19,646,673,206.00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 19,646,673,206.00

d. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain:

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Dukungan Personil
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	7
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	7

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum antara lain:

1. Di bidang produksi, PDAM tidak bisa meningkatkan kapasitas produksi secara maksimal karena faktor keterbatasan air baku baik secara kualitas/ kuantitas dan



sarana instalasi pengolahan air perlu perbaikan untuk dapat menambah kapasitas produksi.

2. Untuk jaringan distribusi, di beberapa jaringan distribusi sudah jenuh, sehingga tidak dapat ditambah pelanggan. Serta adanya jaringan yang berumur tua, sehingga sering terjadi kebocoran.

Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Di bidang produksi, dilakukan perbaikan sarana prasarana Instalasi pengolahan air yang ada sehingga dapat beroperasi maksimal dan bekerjasama lintas sektoral untuk perbaikan kualitas air baku
2. Untuk jaringan perpipaan dilakukan rehabilitasi jaringan pipa yang sudah tua, pemasangan jaringan perpipaan baru, perbaikan sistem operasi distribusi (manajemen tekanan, pendeteksian dan perbaikan kebocoran secara cepat.
3. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk pengembangan pelayanan PDAM, termasuk dalam hal pembiayaan pemasangan jaringan sambungan rumah.
4. Melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi kepada masyarakat Menyusun database pelanggan.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten



b. Target dan realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2024		
					Pembilang	Penyebut	Nilai
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	BPBD	-	-	-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-

c. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Perumahan Rakyat Antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Alokasi Dana
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	-



Alokasi belanja SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak dianggarkan, hal ini dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Penanganan rumah terdampak bencana yang menjadi kewenangan adalah permukiman pasca bencana yang masih dalam kondisi tidak layak huni, sehingga penganggarannya sudah jelas by name by address nya. Di tahun 2020-2024 tidak terjadi bencana besar yang mengakibatkan rumah rusak berat atau perlu tindakan relokasi, sehingga kami tidak menganggarkan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana pada tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk penganggaran penanggulangan bencana menjadi kewenangan dari Badan Penanggulangan Bencana menjadi kewenangan dari BPBD selaku lembaga penyelenggara penanggulangan bencana, sesuai pasal 8 peraturan daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2013. Hal ini selaras dengan pasal 60-64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

- b. Sedangkan untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Kota, Dinas Perumahan Rakyat masih melakukan pendataan kemungkinan adanya rumah masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten sumenep.

a. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	



b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

1. Data rumah yang layak huni untuk korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan secara maksimal
2. Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak dimiliki secara lengkap sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan secara maksimal

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat antara lain :

1. Mencukupi/melengkapi data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antar OPD
2. Memasukkan data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

4.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS

SATPOL PP

5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Propinsi dan Kabupaten /Kota maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat mempunyai mutu pelayanan dasar sub urusan Trantibum meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
- b. Standar sarana dan prasarana Satpol PP;



- c. Standar Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkara sebagaimana dimaksud diatas meliputi Pelayanan kerugian materiil dan Pelayanan Pengobatan.

Sedangkan standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah kabupaten/Kota. Mutu Pelayanan Dasar Meliputi :

- A. Tingkat waktu tanggap (responsif time) 15 menit sejak diterimanya informasi / laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi ;
- B. Prosedur operasional penanganan kebakaran,penyelamatan dan evakuasi ;
- C. Sarana prasarana pemadam kebakaran,penyelamatan dan evakuasi;
- D. Kapasitas aparatur Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/ sumber daya manusia.
- E. Pelayanan Pemadaman,penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- F. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Satpol PP Kabupaten Sumenep telah memasukkan target SPM pada RPJMD dengan program Ketertiban Umum,Ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumenep dari segi penganggarnya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.742.742.034-



Indikator :

- a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kab/Kota;
 - b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kab/Kota;
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.025.759.069-

Indikator :

- a. Penyelesaian terhadap kejadian kebakaran;
- b. Waktu tanggap (*response time*)

5.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Sumenep terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran sebagai berikut :

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi sebesar Rp.3.576.373.500,-

5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Satpol PP Kabupaten Sumenep untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 serta Urusan Sub Bidang Kebakaran baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 14.432.390.058,- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Tuga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Daerah Satpol PP Kab. Sumenep Rp. 14.432.390.058,-



Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi sebesar Rp. 3.576.373.500,- dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran dengan realisasi Rp. 973.314.800,-.

b. Sumber dana lain Rp. -

5.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 232 orang Terdiri dari 81 PNS , 151 Banpol PP. Sedangkan Pelaksanaan SPM Sub Bidang Urusan Kebakaran pada Tahun 2024 didukung oleh Personil sebanyak 38 orang terdiri dari 7 PNS dan 31 Tenaga Pemadam Kebakaran.

5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Banyak pelanggaran perda/perkada yang sifatnya kompleks sehingga perlu dilakukan penyidikan agar hasil penyidikannya profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu risiko kejadian kebakaran di pelosok terutama di kepulauan yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pemadam kebakaran beserta alat penunjangnya. Terakhir seringkali anggota dilapangan baik Satpol PP maupun Pemadam Kebakaran yang membutuhkan dukungan anggaran untuk penyelesaian masalah baik itu trantibumlinmas maupun pemadam kebakaran.

Solusi

Perlunya penambahan anggota PPNS untuk melakukan penyidikan kasus pelanggaran perda/perkada yang bersifat kompleks. Selain itu perlunya penambahan anggaran agar menunjang Standar Pelayanan Minimal seperti anggaran untuk mengikuti pelatihan PPNS, penambahan pos dan personil di pelosok atau kepulauan, serta anggaran penunjang kegiatan lapangan.



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar dalam kebencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep, di antaranya :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang daerah rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

5.2. Target Pencapaian SPM

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana dengan sasaran terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana. Indikatornya adalah persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana, dengan target sebesar 100%.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi dengan sasaran tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi. Indikatornya adalah persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal dengan target 100% paling lama satu tahun.



- Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dengan sasaran terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana. Indikatornya adalah persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan dengan target 100%.
 - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan sasaran Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikatornya adalah persentase jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan dengan target 100% selama satu tahun.
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan sasaran terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana. Indikatornya adalah persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% selama satu tahun.

5.3. Realisasi

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan Informasi Rawan Bencana meliputi Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Ancaman Bencana), ditargetkan sebanyak 100% dan mencapai realisasi sebesar 100%, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$$

Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana sebanyak 573.247 orang. Sedangkan jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana sebanyak 573.247 orang. Jumlah ini merupakan jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang berusia 15-64 tahun. Penyebarluasan informasi rawan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep di



antaranya adalah memberikan pendidikan kebencanaan pada Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pemasangan rambu bencana di wilayah rawan bencana, pemasangan papan informasi bencana di titik-titik strategis, serta pemberitaan melalui media social dan internet

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana meliputi:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi dengan indikator persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal dengan target 100% paling lama satu tahun mencapai realisasi sebesar 100% dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kemajuan pengerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang disusun pada tahun 2024 sebanyak 3 dokumen dari total 3 dokumen Renkon yang direncanakan penyusunannya dimana seluruh dokumen tersebut telah rampung. Adapun dokumen Renkon yang disusun adalah dokumen Renkon Cuaca Ekstrem, Renkon Banjir, dan Renkon Longsor.

- 2) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota, ditargetkan sebanyak 100% dan mencapai realisasi sebesar 100%, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep merencanakan untuk melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang diikuti oleh aparatur maupun warga negara di kawasan rawan bencana. Jumlah target pelaksanaan kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana ini sebanyak 476 orang dan terealisasi sebanyak 476 orang (100%).



Adapun pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang dilaksanakan antara lain: Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Santri Tangguh Bencana (Santana), Sapa Destana, Training of Trainer Destana, Simulasi Penanganan Tanggap Darurat, Simulasi Pemanfaatan Dapur Umum, Pelatihan Water Rescue dan Vertical Rescue.

3) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, ditargetkan sebanyak 100% dan mencapai realisasi sebesar 100%, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep merencanakan untuk melaksanakan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang diikuti oleh aparatur dan warga negara. Jumlah target pelaksanaan kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana ini sebanyak 420 orang dan terealisasi sebanyak 420 orang (100%).

Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 yang diikuti oleh beberapa instansi dan lembaga terkait, di antaranya: Basarnas, Tagana, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Pramuka, Satgas Kali Marengan, serta perwakilan dari Pemerintahan Desa.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana meliputi Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota, ditargetkan sebanyak 23 kejadian dan terealisasi sebanyak 15 kejadian, sehingga tingkat capaiannya adalah 65,21%.

Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$$



Beberapa kejadian yang membutuhkan pertolongan, pencarian dan evakuasi pada tahun 2024 di antaranya adalah: kejadian kecelakaan laut dan evakuasi pohon tumbang.

5.4. Alokasi Anggaran dan Program Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

Alokasi Anggaran dan Program Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Program Penanggulangan Bencana	687.863.499	APBD
2.1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	19.998.444	APBD
2.2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	702.304.022	APBD
2.3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	40.524.345	APBD

5.5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Tahun 2024:

1. Jumlah Pegawai :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep sebanyak 26 orang.

2. Kualifikasi Pendidikan :

- SMP : 1 orang ;
- SMA : 4 orang ;
- S1 : 14 orang ;
- S2 : 7 orang ;
- S3 : 1 orang .

3. Pangkat dan Golongan :

- Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang ;
- Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 orang ;
- Pembina (IV/a) : 3 orang ;



- Penata Tingkat I (III/d) : 5 orang ;
 - Penata(III/c) : 2 Orang;
 - Penata Muda Tingkat I (III/b) : 9 orang ;
 - Penata Muda (III/a) : 3 orang ;
 - Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang ;
 - Pengatur (II/c) : 1 orang ;
4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional :
- Eselon II B : 1 orang ;
 - Eselon III B : 3 orang ;
 - Eselon IV A : 8 orang.

5.6. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan :

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari permasalahan atau hambatan, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari permasalahan atau hambatan yang dihadapi.

Dibawah ini beberapa permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep tahun 2024, antara lain:

Kurang memadainya sarana prasarana dalam penanganan bencana;
Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana.

2) Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut diatas, diperlukan upaya-upaya pemecahan, antara lain sebagai berikut :

- Menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dengan optimal;
- Melakukan lebih banyak sosialisasi kebencanaan terutama kepada murid sekolah.

4.6 URUSAN SOSIAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No.100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal



(SPM) Sedangkan untuk bidang sosial diatur dalam Permensos no. 09 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal bidang sosial.

6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/ Kota

6.2 Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun realisasi kinerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PRATAMA			91,26 %
1.	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI				100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1.297	1.297	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.43 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	77.17 %
	1. Layanan data dan pengaduan	1297	1297	0	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1297	1297	0	100.00 %



	3. Penyediaan permakanan	30	30	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	25	25	0	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu	20	20	0	100.00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	10	10	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	159	159	0	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	159	159	0	100.00 %
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	50	50	0	100.00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan	30	30	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	0	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	0	100.00 %
	13. Layanan rujukan	10	10	0	100.00 %
	JUMLAH	1.297	1.342	0	1,300.00 %
2.	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	364	364	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	90.00 %
	1. Layanan data dan pengaduan	12	12	0	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	30	30	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan	32	32	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	35	35	0	100.00 %
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	30	30	0	100.00 %
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15	15	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	20	20	0	100.00 %
	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	70	70	0	100.00 %
	9. Akses ke layanan pendidikan	35	35	0	100.00 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	30	30	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	25	25	0	100.00 %
	12. Layanan rujukan	30	30	0	100.00 %
	JUMLAH	364	364	0	1,200.00 %



3 .	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI				69.64 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	49,64 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	9.911	6.150	3.761	62%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1. Layanan data dan pengaduan	4.350	4.350	0	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	150	150	0	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan	150	150	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	150	150	0	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu	150	150	0	100.00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	1	1	0	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	400	400	0	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	150	150	0	100.00%
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	2.100	2.100	0	100.00%
	10. Akses ke layanan pendidikan	200	200	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	700	700	0	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1.350	1.350	0	100.00 %
	13. Layanan rujukan	200	200	0	100.00 %
	JUMLAH	9.911	9.911	0	1300.00 %
4 .	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	460	460	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.62 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	83.11 %
	1. Layanan data dan pengaduan	75	75	0	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	10	5	5	50.00 %
	3. Penyediaan permakanan	30	30	0	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	30	30	0	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu	50	25	25	50.00 %



	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	75	50	25	66.67 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	200	200	0	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	75	75	0	100.00 %
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	75	75	0	100.00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan	20	20	0	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	10	10	0	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	0	100.00 %
	13. Layanan rujukan	10	10	0	100.00 %
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	10	5	5	50.00 %
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	10	3	7	30.00 %
JUMLAH		685	618	67	1,246.67 %
5.	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASCA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KAB/ KOTA				19.20 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	16.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	500	100	400	20%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				3.20 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	16.00 %
	1. Penyediaan permakanan	250	100	150	40.00 %
	2. Penyediaan sandang	250	100	150	40.00 %
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	0	0%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0	0%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	0	0	0	0%
JUMLAH		500	200	300	80.00 %

6.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran program kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini :



NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	156.790.250
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	397.258.000
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	9.754.905
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	250.640.590
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	218.995.300
TOTAL		1.033.439.045

6.4 Permasalahan dan Solusi

Total pencapaian kinerja program kegiatan yang menjadi indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah sebesar 91,26% dengan kategori Indeks Pencapaian SPM Tuntas Pratama. Keberhasilan pencapaian tersebut, tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Permasalahan

Beberapa faktor penyebab permasalahan yang ditemukan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep antara lain :

1. Belum optimalnya sinergitas program penanganan kemiskinan antar OPD
2. Rendahnya akurasi dan validitas data terpadu
3. Kurangnya peran keluarga dalam ikut serta menangani PPKS terlantar
4. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5. Belum optimalnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsive gender
6. Kurang optimalnya fungsi lembaga pengarusutamaan gender pada perangkat daerah
7. Belum semua anak memperoleh akses pendidikan



Solusi

Strategi yang dipergunakan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep di masa mendatang antara lain :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat, serta revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintah dan antar sektor terkait.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan memanfaatkan segala potensi yang ada melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
4. Membuat peraturan daerah tentang pelayanan kesejahteraan sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan sosial di masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui peningkatan kapasitas PSKS.
6. Menambah jumlah PSKS yang membantu kerja TKSK sehingga semua permasalahan sosial yang ada di desa bisa terlayani dengan optimal.
7. Komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep pada semua perangkat daerah untuk menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di kegiatannya.
8. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep serta dukungan dari semua instansi guna mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan prioritas fasilitas-fasilitas umum yang responsif gender dan anak.
9. Pengembangan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan desa.
10. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitasi pelayanan perlindungan anak, guna mewujudkan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak secara terarah, komprehensif, terpadu dan berkelanjutan yang disediakan bagi anak dalam situasi rentan atau beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah, serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)



4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 DIKNAS

- a. **Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan, melalui kegiatan :**
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - Peringatan Hari-Hari Besar
 - Operasional UPTD
 - Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran
 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor/rumah dinas
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
 - Operasional Tugas Pembantuan
- b. **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melalui kegiatan :**
 - Pendidikan dan pelatihan formal
 - Pengelolaan dan peningkatan disiplin kepegawaian
- c. **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, melalui kegiatan :**
 - Penyusunan Laporan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
- d. **Program Peningkatan Akses PAUD , melalui kegiatan :**
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (DAK)
- e. **Program Peningkatan Akses SD, melalui kegiatan :**



- Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK)
- f. Program Peningkatan Akses SMP, melalui kegiatan :**
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)
- g. Program Peningkatan Akses PNF, melalui kegiatan :**
 - Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A, B, C
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Rumah Pintar
- h. Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), melalui kegiatan :**
 - Diklat Peningkatan Kompetensi PTK PAUD dan PNF
 - Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SD
 - Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SMP
 - Fasilitasi Kategori II
- i. Program Peningkatan Kualitas PAUD, melalui kegiatan :**
 - Pengembangan Kurikulum PAUD
 - BOP Penyelenggaraan PAUD
 - Pembangunan Karakter Peserta Didik PAUD
 - Fasilitasi Akreditasi PAUD
- j. Program Peningkatan Kualitas SD, melalui kegiatan :**
 - Bimbingan Teknis Kurikulum SD
 - Fasilitasi Akreditasi SD
 - Olimpiade dan Festival SD
 - Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD
 - Fasilitasi Ujian SD
 - Wajib Diniyah SD
 - Fasilitasi SD Rujukan Mutu
 - Monev Sarana dan Prasarana SD
 - Bantuan Operasional Sekolah Dasar
- k. Program Peningkatan Kualitas SMP, melalui kegiatan :**
 - Bimbingan Teknis Kurikulum SMP
 - Fasilitasi Akreditasi SMP
 - Olimpiade dan Festival SMP
 - Fasilitasi Akreditasi SMP



- Olimpiade dan Festival SMP
- Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan SMP
- Fasilitas Penyelenggaraan PPDB SMP
- Fasilitas Ujian SMP
- Lomba Penguatan Pendidikan Karakter
- Wajib Diniyah SMP
- Fasilitas SMP Rujukan Mutu
- Bantuan Operasional SMP

l. Program Peningkatan Kualitas PNF, melalui kegiatan :

- Apresiasi Seni dan Pameran PNF
- Hari Aksara Internasional (HAI)
- BOP Bosda Madin

m. Program Peningkatan Kualitas PNF, melalui kegiatan :

- Peningkatan Kualifikasi Akademik PTK PAUD dan PNF
- Peningkatan Kualifikasi Akademik PTK SD
- Peningkatan Kualifikasi Akademik PTK SMP

4.7.2 URUSAN KESEHATAN

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

4.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

- a. Program Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
 - Sistem Penyediaan Air Minum/Bersih SPAM



- Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK PENUGASAN)
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik
 - Pembangunan MCK/MWK
 - Pembangunan Sanitasi (DAK Reguler)

4.7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

- a. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam / Sosial

4.7.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATPOL PP

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota
- c. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.7.6 URUSAN SOSIAL

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pemberdayaan Sosial
 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota



- c. Program Rehabilitasi Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Penanganan Bencana
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- g. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- h. Program Perlindungan Perempuan
 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- i. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- j. Program Perlindungan Khusus Anak
 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota



- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota





P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan salah satu Laporan Kepala Daerah yang wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat/ Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut merupakan akhir proses manajemen Pemerintah Daerah dari satu periode Tahun Anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring terhadap berbagai kebijakan program dan kegiatan.

Pada dasarnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub-sub sistem Penyelenggaraan Pemerintahan secara nasional yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip - prinsip good governance dan clean governance yaitu Penyelenggaraan Pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan mengedepankan kepentingan pelayanan publik.

Demikianlah gambaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024, dengan harapan bahwa pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang secara nyata dapat diterima oleh masyarakat, sebagai tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan.

Sumenep, 27 Maret 2025

BUPATI SUMENEP



Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H.





BUPATI SUMENEP

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2024



PEMERINTAH KAB.
SUMENEP

#Bismillah Melayani

